

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PANGAN



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018

PADANG, JANUARI 2019

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (LKj Dinas Pangan Sumbar) ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Pencapaian Sasaran Strategis terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah menjadi kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

LKj Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pangan Sumbar. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pangan Sumbar ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Pangan Sumbar untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pangan Sumbar memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari empat indikator yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pangan Sumbar memperlihatkan hasil yang **sangat baik**, dengan kata lain hampir seluruhnya terealisasi bahkan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018.

Namun demikian, masih dirasa perlu dilakukan perbaikan guna penyempurnaan di masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pangan Sumbar Tahun 2018 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Padang, Januari 2019
KEPALA DINAS PANGAN
PROPINSI SUMATERA BARAT,



Ir. E F E N D I, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (LKj Dinas Pangan Sumbar) Tahun 2018 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021. **Visi** tersebut yakni “ **Menjadi Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal** “. Sesuai dengan visi tersebut, maka **misi** Dinas Pangan adalah 1) *Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal*; 2) *Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan*; 3) *Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan*; dan 4) *Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan*

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah *pertama*: Meningkatkan ketahanan pangan; *kedua*: Meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Meningkatkan Kualitas Pangan Masyarakat; *Kedua* adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat; *Ketiga* adalah Stabilitasnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen; *Keempat* adalah Meningkatkan Tata Kelola Organisasi.

Sedangkan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dari keempat sasaran tersebut sebagai berikut : *pertama* : Skor Pola Pangan Harapan (PPH); *kedua* : Ketersediaan Pangan Utama Beras; *ketiga* : Stabilisasi Harga Bahan Pangan Utama (beras dan cabe merah) di tingkat Konsumen; *keempat* : Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat Produsen.

Program dan kegiatan Dinas Pangan Tahun 2018 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan pangan. Isu-isu tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan. Berdasarkan uraian pada Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100,26 %. Capaian kinerja yang tertinggi terdapat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat, yaitu sebesar 101,29%, diikuti berturut-turut dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar 100 %, dan sasaran Stabilitasnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen sebesar 100%.
2. Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh anggaran baik dari anggaran APBN maupun APBD. Akuntabilitas keuangan perprogram untuk pencapaian sasaran tersebut seperti terlihat pada tabel berikut :

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik
1	Program Diversifikasi Pangan	740.160.000	703.428.574	95,04	100,00
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5.247.613.000	5.151.198.817	98,16	100,00
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.516.100.000	9.213.918.890	96,82	100,00
	Jumlah	15.503.873.000	15.068.546.281	97,19	100,00

3. Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

a. Aspek Ketersediaan :

- Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
- Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi)
- Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan
- meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
- Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal

- b. Agar individu atau rumah tangga dapat memiliki akses terhadap pangan, maka pemerintah harus berperan aktif mengendalikan harga di tingkat konsumen. Rekomendasi strategi yang dapat dilaksanakan antara lain :
- Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi pangan yang efektif dan efisien
 - Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan
 - Mendorong peran serta kelembagaan pangan dan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan meningkatkan akses pangan
 - Memantau stabilitas pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat
 - Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui SIDI (Sistem Informasi Dini) dan penyusunan peta rawan pangan melalui Sistem Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG).
- c. Dalam rangka meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :
- Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
 - Gencar melakukan sosialisasi / kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
 - Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu
 - Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat provinsi sendiri maupun tingkat nasional
 - Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, sosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan
- d. Menambah jenis cadangan pangan nasional, tidak hanya beras, tetapi juga komoditi lainnya seperti bawang, cabe, dan lainnya

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Program dan Kegiatan Tahun 2018	9
E. Issu Utama Ketahanan Pangan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Visi dan Misi	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	13
C. Kebijakan dan Strategi	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	19
B. Hasil Pengukuran Kinerja	19
C. Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumbar	20
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi.....	81

Daftar Tabel

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	14
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	16
Tabel 3	Klasifikasi dan Predikat Penilaian Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018	19
Tabel 4	Hasil Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Penetapan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	20
Tabel 5	Realisasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Kualitas Pangan Masyarakat”	22
Tabel 6	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal	23
Tabel 7	Skor PPH Tahun 2018 (angka sementara)	24
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	25
Tabel 9	Angka Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 (Angka Sementara)	26
Tabel 10	Kelompok/Pelaku Pengolahan Pangan Lokal Kabupaten/Kota	27
Tabel 11	Jumlah Sertifikat Prima Yang Telah Diterbitkan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2018	36
Tabel 12	Rekapitulasi Sertifikat Prima yang Telah Diterbitkan Tahun 2018 oleh UPTD-BPMKP Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 13	Pelaku Usaha yang Menerima Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Tahun 2018	38
Tabel 14	Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	41
Tabel 15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat”	43
Tabel 16	Ketersediaan Pangan Secara Natura di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (ARAM I Tahun 2018)	45
Tabel 17	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Sumatera Barat Tahun 2018*	46
Tabel 18	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Mempertahankan Ketersediaan Minimal Terhadap Energi dan Protein (2016 – 2018)	46
Tabel 19	Ketersediaan Energi dan Protein Penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 (ARAM I)	47
Tabel 20	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Mempertahankan Ketersediaan Minimal Terhadap Energi dan Protein	48
Tabel 21	Lokasi Penerima Dana Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 - 2018	52
Tabel 22	Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (penyediaan dan penyalurannya) hingga tahun 2018	54

Tabel 23	Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	57
Tabel 24	Realisasi Tingkat Capaian Sasaran Stabilitasnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen	59
Tabel 25	Gambaran Gejolak Harga Bahan Pangan beras dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2018	61
Tabel 26	Coefisien Variasi Harga Beras Tahun 2017-2018	62
Tabel 27	Gambaran Gejolak Harga Bahan Pangan Cabe Merah dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2018	62
Tabel 28	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras) di Tingkat Konsumen Tahun 2017 dan 2018	63
Tabel 29	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di Tingkat Konsumen (HPP) Tahun 2018	64
Tabel 30	Harga rata-rata gabah (Tingkat petani dan Tingkat Penggilingan) dan beras Premium dan Medium II di tingkat produsen Tahun 2018	65
Tabel 31	REALISASI DISTRIBUSI BERAS DARI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018	69
Tabel 32	REALISASI DISTRIBUSI HORTIKULTURA DARI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018	70
Tabel 33	Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Stabilitasnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen	75
Tabel 34	Dukungan Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	76
Tabel 35	Dukungan Anggaran APBN, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	78
Tabel 36	Rekapitulasi anggaran dan realisasi keuangan per program pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	79
Tabel 37	Alokasi Anggaran Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2018	79

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

8

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Penghargaan-Penghargaan
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Lingkup Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 s/d 2021

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I, berisi :

- a. *Latar Belakang*
- b. *Maksud dan Tujuan*
- c. *Tupoksi Organisasi*
- d. *Program dan Kegiatan*
- e. *Isu Utama Ketahanan Pangan*

A. Latar Belakang

Pemahaman Kepemerintahan yang baik (good governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Pangan Sumbar. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Tugas dan Fungsi

a) Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kedudukan Dinas Pangan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

b) Tugas

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang pangan dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, pengertian Pangan adalah

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dengan pengertian tersebut, dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata diseluruh wilayah Sumatera Barat.
- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau diartikan pangan yang mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Untuk mewujudkan maksud dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat mempunyai **tugas pokok** melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang Pangan.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai **fungsi** :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
3. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Ketersediaan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d) Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pangan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- e. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- f. Kelompok Jabatan fungsional.

Adapun tugas masing-masing bagian diatas, seperti yang termuat dalam Surat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, diantaranya :

1. **Sekretariat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Keuangan

2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

2. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi Pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Harga Pangan; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi Pangan
- b. Seksi Harga Pangan
- c. Seksi Cadangan Pangan

3. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan
- b. Seksi Sumberdaya Pangan
- c. Seksi Kerawanan Pangan

4. **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal dan Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pangan Lokal; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keamanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- b. Seksi Pengembangan Pangan Lokal
- c. Seksi Keamanan Pangan

5. **Unit Pelaksana Teknis Dinas - Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (UPTD-BPMKP)**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2017, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, UPTD-BPMKP Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
- d. Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD-BPMKP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Hasil Pertanian mencakup komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan tugas pokok melaksanakan penguasaan keamanan pangan segar, sertifikasi dan registrasi

Sedangkan fungsi UPTD-BPMKP adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksana Pelayanan Sertifikasi Pangan Hasil Pertanian (Prima 2 dan Prima 3, Good arming Practices (GP) , Good Handling Practices (GHP), Good

Manufacturing Practices (GMP) dan Registrasi Pangan segar asal Tumbuhan (PSAT).

- b. Pelaksana Audit lapangan dalam rangka penerbitan sertifikat rima I oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKP- Pusat).
- c. Pelaksana pengawasan pangan segar yang beredar, beresiko tinggi dan/ atau yang dikemas dan berlabel.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan (UPTD-DPAP)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2017, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, UPTD-DPAP Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pengadaan
- d. Kepala Seksi Penyaluran
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

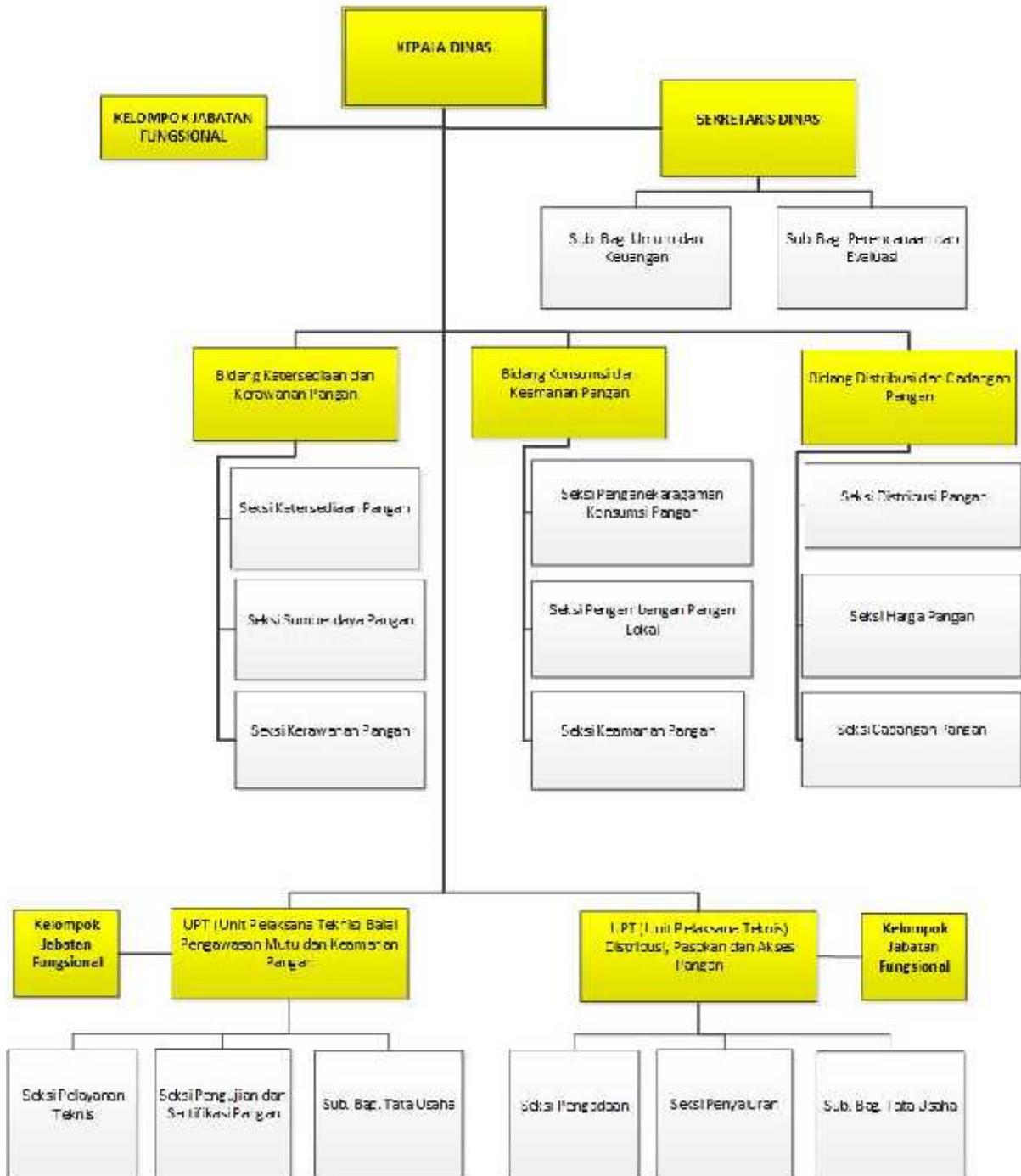
UPTD-DPAP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Dinas Pangan Sumatera Barat.

Sedangkan fungsi UPTD-DPAP adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan pengadaan, mengkoordinasikan, pengkajian, Pengendalian dan evaluasi pengadaan bahan pokok secara efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan perencanaan penyaluran, mengkoordinasikan, pengkajian, Pengendalian dan evaluasi pengadaan bahan pokok secara efektif dan efisien.
- c. Melaksanakan kegiatan yang meliputi pengkoordinasikan perencanaan dan pembuatan laporan di bidang pergudangan.
- d. Melaksanakan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang mutu.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

**Struktur Organisasi
Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**



D. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kemungkinan kondisi kekurangan energi dan protein, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Database Ketahanan Pangan
2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
5. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
6. Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
7. Pengembangan Kawasan dan pembinaan Nagari Mandiri Pangan
8. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
9. Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan
10. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
11. Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah
12. Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan
13. Pengembangan Panel Harga Pangan Pokok
14. Bazar / Pasar Murah Bahan Pangan
15. Serifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikat Prima)
16. Surveilen dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tingkat produsen
17. Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikasi Prima
18. Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (SD/MI)
19. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar di Masyarakat
20. Gerakan Hari Pangan Sedunia
21. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
22. Analisis Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
23. Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Wilayah Sumatera Barat
24. Pengembangan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

b. Program Diversifikasi Pangan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberdayaan di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1 Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)
- 2 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- 3 Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi
- 4 Pengembangan Pangan Tradisional (Lokal) Dalam Menunjang Pariwisata
- 5 Pemantauan Sosialisasi dan Analisa Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)

Selain itu dalam mencapai target dan sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan di Sumatera Barat, pada tahun 2018 mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) dari eselon I Dinas Pangan Kementerian Pertanian dengan 1 (satu) program, yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan kegiatan berikut :

1. Lumbung Pangan Masyarakat
2. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
3. Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan
4. Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
5. Kawasan Mandiri Pangan
6. Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan
7. Pemberdayaan Pekarangan Pangan
8. Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar
9. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
10. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

E. Isu Utama Ketahanan Pangan

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut ;

- 1) Aspek Ketersediaan
 1. Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan untuk perumahan.
 2. Penyediaan sarana produksi (pupuk an organik) belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat petani, sementara pupuk organik belum bisa di andalkan sebagai substitusi pupuk an organik.
 3. masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan.
 4. Terbatasnya infrastruktur irigasi (teknis/setengah teknis/ sederhana) yang potensial dan dapat diandalkan
 5. kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang

6. Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten/kota sebesar 100 ton sejauh ini masih di tingkat provinsi yang memenuhinya, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota masih belum seluruhnya memfasilitasinya
- 2) Aspek Distribusi Pangan
1. Kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan.
 2. Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas
 3. belum terpolanya distribusi bahan pangan antar kabupaten/kota dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu-pintu masuk yang tersebar pada kabupaten/kota yang berada pada daerah perbatasan dengan Provinsi tetangga, sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini mengakibatkan fluktuasi harga pangan.
 4. belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/ beras
 5. Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu di konsumen
 6. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
- 3) Aspek Konsumsi Pangan
1. Pola Konsumsi masyarakat Sumatera Barat belum mengacu pada Beragam, Bergizi dan Berimbang
 2. Belum berkembangnya Teknologi Industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal.
 3. Belum berkembangnya pangan alternatif yang berbasis sumberdaya pangan lokal.
 4. Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun.
 5. Rendahnya kesadaran masyarakat atas perlunya pangan sehat
 6. Ketidakmampuan penduduk miskin untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi gizi sehat
 7. merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan
 8. pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II, berisi :

- a. Visi, Misi*
- b. Tujuan dan Sasaran Strategis*
- c. Kebijakan dan Strategi*
- d. Perjanjian Kinerja Tahun 2018*

A. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD baik OPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2016-2021, RPJMD Sumatera Barat disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

1. Visi

Visi Dinas Pangan adalah ;

“ Menjadi Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal “.

Visi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat diatas mempunyai makna sebagai berikut:

- Handal : Mengandung makna bahwa mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan.
- Kemandirian pangan : Mengandung makna bahwa kemampuan provinsi Sumatera Barat dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.
- Sumber daya lokal : Mengandung makna bahwa pangan, baik dari sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya masyarakat provinsi Sumatera Barat.

2. Misi

Guna mewujudkan visi Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021 di atas, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan.
- c. Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- d. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan
- b. Meningkatnya kinerja organisasi

2. Sasaran

Mengacu kepada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Misi : *Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, dengan sasaran :*
 1. Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat.
- b. Misi : *Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan, dengan sasaran :*
 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.
- c. Misi : *Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan sasaran :*
 1. Stabilitnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen.
- d. Misi : *Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan, dengan sasaran :*
 1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2018
1	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,2
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2. Ketersediaan Pangan Utama Beras (ton)	1.530.178
3	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	3. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV) 3.1. Beras (%) 3.2. Cabe Merah (%)	≤ 10 ≤ 25
		4. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)	≥ HPP
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		6. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	95

C. Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal.

2. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
3. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
4. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
5. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat.
6. Menjaga stabilitas Harga Pangan.
7. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien.
8. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.
9. Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor.
10. Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana

2. Strategi

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut

1. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.
2. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan.
3. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga.
4. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;.
5. Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan
6. Meningkatkan SDM Aparatur Dinas Daerah

D. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Sumatera Barat. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi. Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, kinerja Dinas Pangan tahun 2018 berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2018
1	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,2
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2. Ketersediaan Pangan Utama Beras (ton)	1.530.178
3	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	3. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV) 3.1. Beras (%) 3.2. Cabe Merah (%)	≤ 10 ≤ 25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2018
		4. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)	≥ HPP
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		6. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	95

NO	PROGRAM	ANGGARAN		
1	Program Diversifikasi Pangan	Rp	740.160.000	APBD
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	5.247.613.000	APBD
	Jumlah APBD	Rp.	5.987.773.000	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	9.516.100.000	APBN
	Jumlah APBD + APBN	Rp	15.503.873.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III, berisi :

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja*
- b. Hasil Pengukuran Kinerja*
- c. Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumbar*

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Tahun 2018. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3. Klasifikasi dan Predikat Penilaian Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No.	Klasifikasi	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	< 53 %	Gagal

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Penetapan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	1	Skor Pola Pangan Harapan *)	%	85,2	86,3	101,29
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2	Ketersediaan Pangan Utama Beras **)	ton	1.530.178	1.530.180	100,00
3	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	3	Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen				
			3.1. Beras (%)	Cefisien Variasi / CV	10	3,09	100,00
			3.2. Cabe Merah (%)	Cefisien Variasi / CV	25	23,42	100,00
		4	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	HPP	HPP	HPP	100,00
Rata - Rata Capaian							100,26
NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		%	
(a)	(b)	(c)		(d)		(e)	
1	Program Diversifikasi Pangan	740.160.000		703.428.574		95,04	
2	Program Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	5.247.613.000		5.151.198.817		98,16	
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.516.100.000		9.213.918.890		96,82	
Jumlah		15.503.873.000		15.068.546.281		97,19	

Dari tabel diatas, dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, **Hampir keseluruhan indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih.** Rata-rata nilai capaian sebesar 100,26% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **sangat baik**.

Tingkat keberhasilan ketercapaian ini menunjukkan komitmen dan kerja keras Dinas Pangan Sumbar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan dan pengendalian pangan selama tahun 2018.

C. Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat Tahun 2018

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Pencapaian kinerja Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang didukung dengan dana APBD melalui belanja langsung urusan dilaksanakan melalui 2 Program, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Diversifikasi Pangan. Sedangkan dukungan APBN melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur dalam hal pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang akan dijelaskan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Pangan Masyarakat adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganekaragamkan jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengertian penganekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. **Pertama, penganekaragaman horizontal**, yaitu upaya untuk menganekaragamkan konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan dan upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas tersebut. Sebagai contoh, pengaturan komposisi makanan sehari-hari kita di samping beras, juga umbi-umbian, sagu, kacang-kacangan, ikan, sayur, buah dan lain-lainnya. **Kedua, penganekaragaman vertikal**, yaitu upaya untuk mengolah komoditas pangan, terutama non beras, sehingga mempunyai nilai tambah dari segi ekonomi, nutrisi maupun sosial. Misalnya mengolah jagung menjadi "corn flake", ubi kayu diolah menjadi berbagai macam makanan, baik makanan pokok, maupun jajanan, seperti misalnya kripik ("cassava chips").

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan



pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya kualitas pangan masyarakat" ini terdapat 1 indikator seperti pada tabel berikut.

Tabel 5 . Realisasi Tingkat Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1 Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) *)	%	85,2	86,3	101,29
	Rata-rata Capaian				101,29

Ket. : *) Angka Sementara Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pangan masyarakat" adalah sebesar 101,29 %. Artinya bahwa target indikator Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) tercapai. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

Indikator Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah

setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein, pada tahap awal akan menyebabkan rasa lapar dan dalam jangka waktu tertentu berat badan akan menurun yang disertai dengan menurunnya produktivitas kerja. Kekurangan zat gizi yang berlanjut akan menyebabkan status gizi kurang dan gizi buruk. Apabila tidak ada perbaikan konsumsi energi dan protein yang mencukupi, pada akhirnya tubuh akan mudah terserang penyakit infeksi yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*), cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideal dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 100 seperti yang terlihat pada tabel berikut ;

Tabel 6 : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal
1.	Padi-padian (beras jagung, terigu)	25
2.	Umbi-umbian (singkong, ubi jalar, talas, sagu, kentang, dll)	2,5
3.	Pangan hewani (daging sapi, daging kambing, ayam, dll)	24
4.	Minyak dan lemak (minyak goreng, gajeboh)	5
5.	Buah/biji berminyak (kelapa, kemiri)	1
6.	Kacang-kacangan (tempe, tahu, oncom, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dll)	10
7.	Gula (gula pasir, gula merah)	2,5
8.	Sayur dan buah	30
9.	Lain-lain (minuman dan bumbu-bumbuan)	0
	Total	100

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan

semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kkal/kap/hari)}}{2000 \text{ kkal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = \Sigma (\% \text{ AKE} \times \text{bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH merupakan perbandingan antara Skor PPH maksimal dengan Skor AKE, dimana jika skor AKE \geq Skor PPH Maksimal, maka skor PPH yang digunakan adalah Skor PPH Maksimal, namun jika skor AKE $<$ Skor PPH Maksimal maka Skor PPH yang digunakan adalah Skor AKE

Skor PPH penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 *) Angka sementara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 : Skor PPH Tahun 2018 (angka sementara)

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari) Tahun 2017*	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1.351,7	58,8	67,6	0,5	29,4	33,8	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	39,9	1,7	2,0	0,5	0,9	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	210,5	9,2	10,5	2,0	18,3	21,0	24,0	21,0
4	Minyak dan Lemak	319,4	13,9	16,0	0,5	6,9	8,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	97,7	4,3	4,9	0,5	2,1	2,4	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	54,0	2,3	2,7	2,0	4,7	5,4	10,0	5,4
7	Gula	93,1	4,0	4,7	0,5	2,0	2,3	2,5	2,3
8	Sayur dan Buah	102,1	4,4	5,1	5,0	22,2	25,5	30,0	25,5
9	Lain-lain	31,1	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	2.299,3	100,0	115,0		86,6	99,5	100,0	86,3

Ket: Data Olahan Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat

*) Angka Sementara Tahun 2018

Berdasarkan olahan data Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, angka PPH tahun 2018 (angka sementara) adalah sebesar 86,3. Skor PPH yang melebihi skor maks adalah kelompok konsumsi padi-padian, minyak dan lemak, serta buah / biji berminyak. Sedangkan yang jauh berada dibawah skor maks adalah kelompok konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula serta sayur dan buah. Hal ini menunjukkan bahwa Pola Pangan Harapan (PPH) belum beragam dengan sumbangan terbesar dari kelompok padi-padian. Penduduk Sumbar sudah seharusnya meningkatkan penganekaragaman / diversifikasi pangan misalnya dengan mengurangi pola makan mengkonsumsi padi-padian (dalam hal ini beras yang lebih mendominasi) dan berdiversifikasi ke kelompok umbi-umbian, serta lebih meningkatkan konsumsi pangan hewani dan sayur-sayuran.

Jika dibandingkan dengan target PPH tahun 2018 (RPJMD 2016 – 2021), skor PPH penduduk Sumatera Barat sudah melebihi dari target tetapi masih jauh dari target PPH ideal (target nasional) sebesar 100. Nilai capaian untuk indikator ini adalah 100,83 %. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

Tabel 8 : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat

URAIAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					% CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018 *)	2014	2015	2016	2017	2018 *)
1. Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	%	77	78	84	84,6	85,2	83,7	83,8	84,5	86,3	86,3	108,70	107,44	100,60	102,01	101,29

*) Angka Sementara Tahun 2018

Untuk mendukung capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat”, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan hal-hal berikut :

a. Pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Jargon konsumsi pangan “4 sehat 5 sempurna” saat ini sudah beralih ke konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Pangan yang B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protrein maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan aman bagi tubuh. Perlunya pangan yang B2SA ini adalah dikarenakan tidak ada satupun jenis pangan yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu manusia membutuhkan lebih kurang 45 jenis zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air) dalam jumlah yang cukup dari berbagai jenis makanan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Pangan B2SA memenuhi Triguna Makanan, yaitu sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangun (pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan tubuh) dan sebagai sumber zat pengatur (meningkatkan dan menjaga kebugaran tubuh). Sebagai sumber tenaga zat gizi yang dibutuhkan adalah karbohidrat dan kandungan karbohidart terdapat dalam kelompok makanan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak serta gula. sebagai zat pembangun dibutuhkan zat gizi protein, dan kandungan protein terdapat dalam pangan hewani dan kacang-kacangan. Sedangkan sumberzat pengatur terdapat dalam zat gizi vitamin dan mineral, dan kandungan vitamin dan mineral terdapat dalam kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan.

Indikator Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) ini terdiri dari 2 (dua) sub indikator, sebagai berikut **konsumsi energi** dan **konsumsi protein**. Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merumuskan bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata pada tingkat konsumsi adalah sebesar **2.000 Kkal/kap/hari**. Untuk angka konsumsi protein menurut WNPG adalah sebesar **52 gram/kap/hari**. Angka tersebut juga dijadikan target konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat tahun 2018. Angka konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat tahun 2018 (angka sementara) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 : Angka Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 (Angka Sementara)

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr)	Konsumsi Protein (Gram/kap/hr)	Target Konsumsi Pangan s/d 2020 (Kkal/kap/hr)
		2018*)	2018*)	
1	Padi - Padian	1.351,7	30,2	1.000
2	Umbi - Umbian	39,9	0,6	120
3	Pangan Hewani	210,5	20,0	240
4	Minyak & Lemak	319,4	0,0	200
5	Buah/ Biji Berminyak	97,7	0,9	60
6	Kacang - Kacangan	54,0	5,8	100
7	Gula	93,1	0,0	100
8	Sayur dan Buah	102,1	3,5	120
9	Lain - lain	31,1	1,5	60
Total		2.299,34	62,61	2.000

Ctt. *) Angka Sementara 2018

Berdasarkan tabel di atas, angka konsumsi energi penduduk Sumatera Barat tahun 2018 (angka sementara) adalah sebesar 2.299,34 Kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein sebesar 62,61 gram/kapita/hari. Dibandingkan dengan target konsumsi energi Nasional (2.000 Kkal/kapita/hari), angka konsumsi energi penduduk Sumatera Barat tahun 2018 lebih besar dari target. Capaian konsumsi energi tahun 2018 sebesar 119,8 % dan konsumsi protein 120,38 % dengan rata-rata capaian tahun 2018 sebesar 179,99 %. Penyumbang konsumsi energi terbesar berada pada kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak serta buah/biji berminyak,. Sedangkan umbi-umbian dan sayur dan buah berada jauh dibawah target nasional. Artinya konsumsi penduduk Sumatera Barat masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian terutama beras. Konsumsi buah dan biji berminyak penduduk Sumatera Barat juga sangat



tinggi, hal ini disebabkan karena penduduk Sumatera Barat suka mengkonsumsi makanan bersantan yang menyebabkan banyak penyakit. Oleh karena itu disarankan agar penduduk Sumatera Barat dapat mengurangi konsumsi buah / biji berminyak dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi karbohidrat jenis padi-padian, seperti meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Penganekaragaman konsumsi karbohidrat ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap padi-padian yang semakin lama semakin terbatas jumlahnya karena masalah lahan dan gangguan bencana.

b. Pengembangan Pangan Lokal

Pangan lokal adalah makanan yang berasal dan dibuat dari produk setempat dan diproses dengan sumber daya dan kearifan lokal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal merupakan salah satu contoh pengetahuan tradisional yang dapat memberikan kebanggaan suatu bangsa, kelompok etnik, atau masyarakat di wilayah tertentu karena pengetahuan tersebut memberi identitas daerah.

Salah satu upaya dalam pengembangan konsumsi pangan dilaksanakan melalui pengembangan pangan lokal, karena pangan lokal merupakan pangan yang sudah dikenal, mudah diperoleh disuatu wilayah, jenisnya beragam dan dapat diusahakan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Dengan demikian, pengembangan pangan lokal diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pangan yang beragam ditingkat rumah tangga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Pada tahun 2018, Dinas Pangan Provinsi Sumatera telah melakukan pembinaan ke 58 kelompok pangan lokal di 19 kabupaten/kota. Diharapkan dengan adanya pengembangan pangan lokal ini, dapat mendukung diversifikasi pangan lokal di Sumatera Barat baik meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas produk pangan lokal. Kelompok Pengolahan Pangan Lokal yang ada di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Kelompok/Pelaku Pengolahan Pangan Lokal Kabupaten/Kota

NO.	KAB/KOTA	NAMA KELOMPOK	LOKASI
	KOTA		
1.	Bukittinggi	Arai Pinang	Jl. Sudirman No. 42 Bukittinggi
		Mayang Sari V	Jl. Kusuma Bhakti Gang Aster
		UP3HP Bunda Kreatif	Jl. Angku Basa No. 29 C Tarok
		UP3HP Pulai Jaya	Jl. Wisma Ganting Permai Pulai Anak Air

NO.	KAB/KOTA	NAMA KELOMPOK	LOKASI
2.	Padang	UP3HP Karya Bersama	Kel. Korong Gadang, Kecamatan Kuranji
		Tanamo Coklat	Simpang Adabiah No. 2
		UP3HP Bunga Mas Berkah	Padang
3	Payakumbuh	KWT Markinis	Jl. Dr. Ir. Sutami Sicincin Payakumbuh Timur
		KWT Sumber Rezeki	Kec. Koto Tangah Payakumbuh Barat
		KWT Lurah Taluak	Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan
		KWT Bundo Mudo	Kel. Balai Tengah Koto RW 2
4	Sawahlunto	Tunas Muda LOBANA	Desa Muara Kalaban
		KWT Anggrek	Desa Salak Kelurahan Talawai
5	Pariaman	Anggrek Bulan	Dusun Selatan Desa Kp. Baru Kec. Pariaman Tengah
		KWT Hijau Berseri	Jl. M. Yamin No. 17 Kel. Taratak Kec. Pariaman Tengah
6	Solok	Aneka Kue Arden	RT 03/RW 01 Pasar Pandan Air Mati
		Cindy Snack	Gurun nagari
7.	Padang Panjang	Ambun Pagi II	Jl. Syeh Sulaiman Arasuli RT X Kel. Ekor Lubuk Padang Panjang Timur
		KWT Seruni	Jl. Adam BB No. 25 TR 15 Balai - balai
	KABUPATEN		
8.	Solok	Kel. Hidayah	
		Karya Sari Wanita	Nag. Koto gadang Guguk Kec. Gn. Talang
		Kelapa Gonseng Ubi	B. Tandang Bukit Sundi
		Roza Nita	Kampung markis Nagari Gantung Ciri Kec. Kubung
9.	Solok Selatan	KWT Kamboja	Jr. Koto Kaciak Nag. Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu
		KWT Gender Sungai Langkitang	Jr. Sungai Lingkitang Kec. Sangir
		UP3HP Melati	

NO.	KAB/KOTA	NAMA KELOMPOK	LOKASI
		Karya Wanita	Jl. Sepandia Angek Nagari Pekan Kec. KPGD
10	Pasaman Barat	KWT Srikandi	Sumber Agung Kecamatan Kinali
		KWT Pertiwi	Translop Jrg. Timba Abu Nag. Kajai Kec. Talamau
		Dahlia IVA	Kinali
		Bahagia Bersama	Tanjung pangka Kec. Pasaman
11	Pesisir Selatan	KWT Taman Sayur	Kampung Sungai Limau Nag. Sungai Sarik Kec. Silaut
		Novelda	Jinang Kampung Pantur Kec. Koto XI Tarusan
		Anggrek Culinary Creation	Carocok Painan
12	Tanah Datar	KWT Sukses Mandiri Lintau	Jrg Kota Tepi Sel
		Baringin Sati Rambatan	Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kec. Rambatan
		Fajar Baru	Nagari Parambahan Kec. Lima Kaum
		Kamboja Indah	Nagari Lubuk jantan Kec. Lintau Buo Utara
13	Pasaman	KWT Permata Bunda	Jl. Kampung Sipisang No.5 D Jrg. Guguak Salareh Aia Nagari Alahan Mati Kec. Simpang Alahan Mati
		KWT Harapan Baru	Simpang Utara Kec. Simpatsi
14	Lima Puluh Kota	Kerupuk Ubi Singkong	Sarilamak Kec. Harau
		Keripik Singkong	Jorong Kapalo Koto Nagari Koto tengah Simalanggang
		Sehati	Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh
		Senada	Kapalo Bukik Lareh Sago Halaban Nagari Batu Payuang

NO.	KAB/KOTA	NAMA KELOMPOK	LOKASI
15	Agam	KWT UP3HP Kaliwari	Kamang Hilir Kec. Kamang Magek
		Kelompok kerupuk Pitaruah Mandesh	Jorong Ladang Tibaralu Kenagaraan Koto Tengah
		Pusako Bundo	Nag. Parit Panjang Jorong Parit Panjang Kecamatan matur
		KWT Anggrek	Kec. Tanjung Raya
16	Padang Pariaman	Dewi Fortuna	Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau
		KWT Kebersamaan	Nagari Lurah Ampalu Kec. VII Koto Sungai Sarik
		KWT Mekar Sari	Sicincin Padang Pariaman
		KWT Aur	Lubuk Alung Padang Pariaman
17	Sijunjung	KWT Mandiri	Jorong Batu Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII
		KWT Ranah Minang	Jorong Padang ranah Nagari Sijunjung
		KWT Serba Guna	Pamatang Sijunjung
18	Dharmasraya	KWT Sehati	Jrg Lagan jaya I Nagari Sipangkur Kec. Tiumang
		Tani Sadar	Jr. Parik Taratk Nag. Sikabau Kec. Pulau Punjung
			Jr. Pulau Punjung Nag. IV Koto Kec. Pulau Punjung

Potensi makanan tradisional (pangan lokal) Sumatera Barat yang dikenal dengan Masakan Padang berpeluang untuk dijadikan daya tarik wisata di Sumatera Barat. Keunikan dan kespesifikan makanan tradisional/pangan lokal Sumatera Barat kalau dikelola dengan baik dan profesional serta memperhatikan kebutuhan wisatawan akan memiliki fungsi ekonomi yang kuat di bidang pariwisata yakni wisata kuliner. Oleh sebab itu perlu diciptakan strategi yang dapat menjadikan kespesifikan pangan tradisional/lokal menjadi daya tarik wisata Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi tersebut maka kita harus senantiasa melakukan upaya melestarikan keanekaragaman sumber pangan lokal, dan meningkatkan citra makanan non beras setara dengan makanan beras/terigu. Makanan lokal dirancang dapat untuk mendorong pembangunan ekonomi, khususnya melalui pariwisata, sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lanjut terhadap pangan lokal khususnya non beras/ terigu .

Di sisi lain, di era globalisasi saat ini, permintaan konsumen akan produk pangan terus berkembang. Konsumen tidak hanya menuntut produk pangan bermutu, bergizi, aman, dan lezat, namun juga sesuai selera atau bahkan dapat membangkitkan efek gengsi atau berkelas bagi yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, inovasi atau kreasi terhadap produk pangan tidak hanya terfokus pada mutu, gizi, dan keamanan semata. Namun aspek selera konsumen (preferensi) juga patut dipertimbangkan.

Oleh sebab itu, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan lomba Pengolahan Pangan Lokal tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2018 di Lapangan Sepakbola Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Lomba diikuti oleh 18 peserta dari utusan kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Adapun Pemenang Lomba pengolahan pangan lokal adalah sebagai berikut:



Foto bersama para pemenang Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Stand Pameran Terbaik dengan Bupati Dharmasraya, Ketua TP-PKK Kab. Dharmasraya serta Kadis Pangan Provinsi Sumatera Barat.

1. Juara 1 : Kota Padang dengan produk olahan Talas Lapis Daging dan Banana Chokies
2. Juara 2 : Kota Sawahlunto dengan produk olahan Bola-bola Tamo dan Kue Pisang Coklat.
3. Juara 3 : Kabupaten Solok Selatan dengan produk olahan Roda Krispi dan Egg Roll Tapis.

Selain itu, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan lomba Cipta Menu tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang dilaksanakan bersamaan dengan Lomba pengolahan pangan lokal. Lomba ini diikuti oleh 18 peserta dari utusan kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Adapun Pemenang Lomba Cipta Menu adalah sebagai berikut:

1. Juara 1 : Kota Padang Panjang
2. Juara 2 : Kabupaten Tanah Datar
3. Juara 3 : Kabupaten Pasaman

Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat menumbuhkan motivasi stakeholder ketahanan pangan untuk berpartisipasi aktif secara berkelanjutan dalam pembangunan ketahanan pangan dan mengkomunikasikan hasil pembangunan ketahanan pangan kepada masyarakat luas.

c. Pangan beredar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Sumatera Barat maupun dari luar provinsi belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Kebijakan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya cemaran yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.



Diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Sumatera Barat dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait, serta dengan melaksanakan rapat koordinasi tim terpadu pengawasan keamanan pangan segar. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar dan swalayan) diuji di laboratorium sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan

pangan tersebut. Dengan demikian terjadi peningkatan ketersediaan pangan segar yang aman dan bermutu yang beredar di tengah masyarakat.

Tahun 2018 penanganan keamanan pangan segar dilakukan terhadap 55 sampel yang diambil dari beberapa lokasi di Sumatera Barat yang terdiri dari :

1. 10 sampel untuk uji formalin pada ikan segar/basah.
2. 18 sampel untuk uji residu pestisida pada sayur (cabe merah 4 sampel, bawang merah 4 sampel, daun bawang 2 sampel, tomat 4 sampel dan seledri 4 sampel);
3. 27 sampel untuk uji asam benzoate pada bumbu giling (bawang merah giling 3 sampel, bawang putih giling 5 sampel, laos giling 5 sampel, jahe giling 5 sampel, kunyit giling sebanyak 6 sampel, dan cabe merah giling sebanyak 3 sampel);

Dari 18 sampel sayur yang diambil dan sudah dilakukan uji laboratorium, terdapat 13 sampel terdeteksi residu pestisida (bawang merah 2 sampel, cabe merah 4 sampel, daun bawang 1 sampel, tomat 3 sampel dan seledri 3 sampel), namun kandungan residu pestisida tersebut masih dibawah batas maksimal yang diperbolehkan (BMR).

Dari 27 sampel bumbu giling yang diuji laboratorium, didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Sampel	Jumlah		Total Sampel
		Memenuhi Syarat (maks 600 mg/kg)	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Bawang Merah giling	2	1	3
2	Bawang putih giling	3	2	5
3	Laos giling	5	-	5
4	Jahe giling	4	1	5
5	Kunyit giling	6	-	6
6	Cabe Merah Giling	2	1	3
	Total	22	5	27

Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap bumbu masak yang diuji, terlihat bahwa dari 3 sampel bawang merah giling yang diuji terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi syarat kesehatan karena mengandung residu diatas ambang batas yang diizinkan untuk kesehatan. Untuk sampel bawang putih sebanyak 5 sampel yang diuji terdapat 2 sampel yang mengandung residu diatas ambang batas yang diizinkan untuk kesehatan. Untuk sampel laos yaitu sebanyak 5 sampel laos giling memenuhi syarat kesehatan. Untuk sampel jahe giling sebanyak 5 sampel yang diuji sebanyak satu sampel ditemukan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Sampel kunyit yang di uji sebanyak 6 sampel memenuhi syarat untuk kesehatan. Dan 3 sampel cabe merah giling terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Sehingga secara keseluruhan 27 sampel terdapat 5 sampel yang tidak memenuhi syarat aman dan layak untuk konsumsi.

Dari 10 sampel ikan segar / basah yang diuji laboratorium, tidak ditemukan sampel yang terdeteksi formalin.

Tingkat keamanan pangan segar yang diambil sampelnya ini adalah sebesar 90,91 %. Hasil perolehan ini didapat dari rumusan:

Berdasarkan hasil uji residu pestisida pada sayur sebanyak

% penanganan keamanan pangan segar	=	Jumlah sampel bahan pangan yang aman dikonsumsi apabila dibawah BMR (Batas Minimal Residu) dan tidak tercemar bahan yang dilarang	x	100%
		jumlah total sampel yang diambil		
% penanganan keamanan pangan segar tahun 2018	=	50	x	100%
		55		
	=	90,91		

d. Ketersediaan produk pangan segar yang bermutu (memiliki sertifikat dan nomor register) di masyarakat

Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. Penyediaan pangan yang cukup disertai terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan yang dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan konsumen akan keamanan pangan yang juga turut mendorong kesadaran produsen menuju persaingan sehat yang berhulu pada jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian. Pengakuan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dinyatakan mampu dan memenuhi persyaratan.

➤ Sertifikat Prima

Sertifikat prima adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3). Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan

mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Prima Satu (P-1) merupakan penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, dan cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Prima Dua (P-2) yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Sedangkan



Prima Tiga (P-3) adalah penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

Pemberian sertifikasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKPP). Pemberian sertifikat kepada pelaku usaha

pertanian merupakan pengakuan bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian. Sertifikasi Prima Tiga atau Prima Dua dikeluarkan oleh OKKPD, sedangkan sertifikasi Prima Satu dikeluarkan oleh OKKPP.

Tahun 2006 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai instansi yang berwenang (otoritas kompetensi) dalam menangani pengawasan keamanan pangan segar dengan SK Gubernur No. 520-329-2006. Selanjutnya sebagai pemegang otoritas pengawasan keamanan pangan segar telah dilakukan kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk koordinasi dengan aparat terkait Provinsi, Kabupaten/Kota, peningkatan SDM petugas dan masyarakat tentang keamanan pangan, Identifikasi dan Sosialisasi dalam rangka mempersiapkan bahan pengawasan lebih lanjut oleh Tim Pengawasan Keamanan Pangan Segar Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2009 melalui Perda No. 3/2008 yang disempurnakan dengan Perda No. 7/2009 dan ditindaklanjuti dengan Pergub No. 66/2009, dimana menetapkan bahwa pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi mutu pangan segar di Sumatera Barat.

Dengan ditetapkannya OKKPD sebagai unit kerja yang melakukan pengawasan keamanan pangan hasil pertanian diharapkan mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan mutu dan keamanan pangan, sehingga operasional pengawasan akan berjalan secara efektif.

Tahapan penerbitan sertifikat prima 3 adalah melalui identifikasi, audit lapangan, audit lanjutan, tinjauan komisi teknis serta rapat komisi teknis untuk memutuskan Kebun / komoditi Pelaku Usaha Agribisnis (PUA) yang berhak mendapatkan sertifikat Prima 3.

Jumlah sertifikat prima yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 : Jumlah Sertifikat Prima Yang Telah Diterbitkan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2018

URAIAN	SATUAN	2011 - 2016	2017	2018
Sertifikasi keamanan pangan segar (sertifikat prima)	sertifikat	199	114	105

Berdasarkan tabel di atas jumlah Sertifikat Prima yang telah diterbitkan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2011 hingga 2018 adalah sebanyak 418 sertifikat.

Pada tahun 2018 telah diterbitkan sebanyak 105 sertifikat, dimana 100 sertifikat prima melalui dana APBD dan 5 sertifikat prima melalui dana APBN. Rekapitulasi sertifikat prima yang telah diterbitkan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 : Rekapitulasi Sertifikat Prima yang Telah Diterbitkan Tahun 2017 oleh UPTD-BPMKP Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Sertifikat	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
APBD			100		
1	Kab. Limapuluh Kota	Jeruk Siam	15	Kec. Gunung Omeh	Prima 3
		Manggis	22	Kec. Bukit Barisan	Prima 3
2	Kab.Tanah Datar	wortel	3	Kec. X Koto	Prima 3
		cabe merah	6	Kec. X Koto	Prima 3
		seledri	1	Kec. X Koto	Prima 3
		bawang daun	1	Kec. X Koto	Prima 3
3		Kab. Agam	Cabe	14	Kec. Banuhampu
	Selada		2	Kec. Banuhampu	Prima 3
	Kubis Bunga		4	Kec. Banuhampu	Prima 3

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Sertifikat	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Bawang Daun	4	Kec. Banuhampu	Prima 3
		Seledri	1	Kec. Banuhampu	Prima 3
		Kcg. Buncis	1	Kec. Banuhampu	Prima 3
		Terung	6	Kec. Banuhampu	Prima 3
		Kubis	3	Kec. Banuhampu	Prima 3
		Labu Siam	1	Kec. Banuhampu	Prima 3
		Kentang	1	Kec. Banuhampu	Prima 3
		Wortel	4	Kec. Banuhampu	Prima 3
		Naga	3	Kec. Tilatang Kamang	Prima 3
4	Kab. Pdg. Pariaman	Jambu Biji	1	Kec.VII Koto Sei Sariak	Prima 3
		Manggis	7	Kec.VII Koto Sei Sariak	Prima 3
APBN			5		
1	Kab. Agam	Bawang Daun	3	Kec. Banuhampu,	Prima 3
		Cabai Merah	2	Kec. Banuhampu,	Prima 3
T O T A L (APBD + APBN)			105		

Pada tahun 2017 telah diterbitkan sebanyak 114 sertifikat, dimana 109 sertifikat prima melalui dana APBD dan 5 sertifikat prima melalui dana APBN. Sertifikat prima yang diterbitkan tahun 2017 ini untuk komoditi jeruk 69 sertifikat, jeruk keprok 1 sertifikat, sawo 8 sertifikat, durian 1 sertifikat, sayuran 28 sertifikat, strawberry 1 sertifikat, salak 1 sertifikat, cabe merah 1 sertifikat, bawang daun sertifikat, dan kacang buncis 1 sertifikat.

Pada tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 30 sertifikat prima. Sertifikat prima yang diterbitkan tahun 2016 ini untuk komoditi 10 kebun jeruk di Kabupaten Pesisir Selatan, 6 kebun jeruk di Kabupaten Limapuluh Kota, 4 kebun jeruk di Kabupaten Solok Selatan, 5 kebun jeruk Kabupaten Tanah Datar dan 5 kebun sayuran di Kabupaten Agam.

Pada tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 42 sertifikat diantaranya 21 sertifikat untuk komoditi jeruk siam, dan 10 sertifikat untuk komoditi pepaya dan 1 sertifikat untuk komoditi cabe. Pada tahun 2015 juga dilakukan pemeringkatan sertifikat prima 2 untuk komoditi jeruk siam sebanyak 3 sertifikat. Selain itu juga dianggarkan dengan dana APBN sebanyak 7 sertifikat prima 3 komoditi manggis.

Pada Tahun 2014, telah diterbitkan sebanyak 30 sertifikat untuk komoditi Jeruk Siam sebanyak 20 sertifikat, komoditi wortel sebanyak 4 sertifikat, komoditi bawang daun sebanyak 2 sertifikat, komoditi cabe merah sebanyak 2 sertifikat, komoditi terung sebanyak 1 sertifikat dan komoditi kol bunga 1 sertifikat. Selain itu ada 4 sertifikat prima 3 yang

diperpanjang untuk komoditi Jeruk Siam. Pada tahun 2011 s/d 2013 diterbitkan masing-masing sebanyak 7 sertifikat (2011), 30 sertifikat (2012) dan 60 sertifikat (2013).

➤ **Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)**

Pada tahun 2018 ini selain kegiatan penerbitan sertifikat prima juga dilaksanakan kegiatan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Kegiatan ini berupa pemberian nomor registrasi terhadap perusahaan Rice Milling Unit (RMU) yang melaksanakan kegiatan penggilingan padi nantinya dipasarkan dalam bentuk beras kemasan. Sebelum nomor registrasi dikeluarkan oleh OKKPD Provinsi Sumatera Barat, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan audit/penilaian terhadap RMU dari pelaku usaha tersebut apakah layak dikeluarkan nomor register atau tidak serta dilanjutkan dengan uji laboratorium di Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang dengan jenis uji logam. Dari audit/penilaian yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pemohon PSAT, ternyata 10 (sepuluh) pemohon tersebut dapat diterbitkan nomor registrasinya dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. Hasil uji labor dan sertifikat registrasi PSAT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 : Pelaku Usaha yang Menerima Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Tahun 2018

No	Kab/Kota	Nama Penerima/Pimpinan		Alamat	Jenis /Varietas Beras	No Pendaftaran Kementan RI PD dan masa berlaku
I	Kabupaten Pesisir Selatan	1.	Kelompok Lumbung Pangan Timbulun / Buskamil	Kampung Air Terjun, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera	PB.42	13.01.II.I.00.0002.07/18 18-07-2018 s/d 17-07-2023
		2.	Kelompok Lumbungan Timbulun / Buskamil	Kampung Air Terjun, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera	Banang Pulau	13.01.II.I.00.0003.07/18 18-07-2018 s/d 17-07-2023
		3.	Koperasi RMP Saiyo KTM Lunang Silaut	Nagari Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang	Sarai	13.01.II.I.00.0004.08/18 09-08-2018 s/d 08-08-2023
		4.	Koperasi RMP Saiyo KTM Lunang Silaut	Nagari Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang	Serang	13.01.II.I.00.0005.08/18 09-08-2018 s/d 08-08-2023
II	Kabupaten Tanah Datar	1.	KELTAN SAWAH TANGGUANG	Ateh Guguak, Jorong Balai Bungo, Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang	Junjuang	13.04.II.I.00.0003.07/18 18-07-2018 s/d 17-07-2023

No	Kab/Kota	Nama Penerima/Pimpinan		Alamat	Jenis /Varietas Beras	No Pendaftaran Kementan RI PD dan masa berlaku
		2.	KELTAN SAWAH TANGGUANG	Ateh Guguak, Jorong Balai Bungo, Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang	Ciherang (Pulen)	13.04.II.I.00.0004.07/18 18-07-2018 s/d 17-07-2023
		3.	KELTAN SAWAH TANGGUANG	Ateh Guguak, Jorong Balai Bungo, Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang	Anak Daro Kuriak	13.04.II.I.00.0005.07/18 18-07-2018 s/d 17-07-2023
III	Kabupaten Pasaman Barat	1.	KSU GAPOKTAN ALBASIKO II	Jl. Raya Padang Canduh, Kejorong Bangunrejo, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,	IR.42	13.12.II.I.00.0001.08/18 09-08-2018 s/d 08-08-2023
		2.	KSU GAPOKTAN ALBASIKO II	Jl. Raya Padang Canduh, Kejorong Bangunrejo, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,	IR.64	13.12.II.I.00.0002.08/18 09-08-2018 s/d 08-08-2023
		3.	KSU GAPOKTAN ALBASIKO II	Jl. Raya Padang Canduh, Kejorong Bangunrejo, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,	Cisokan	13.12.II.I.00.0003.08/18 09-08-2018 s/d 08-08-2023

➤ Registrasi Rumah Kemas

Pemberian registrasi Rumah Kemas dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi OKKPD dan tuntutan pasar ekspor. Sehubungan dengan pemberian registrasi Rumah Kemas ini perlu dilakukan proses audit mencakup persyaratan administrasi dan teknis yang dilengkapi dengan dokumen audit (ceklist).

Untuk hasil audit Registrasi Rumah Kemas PT. Bumi Alam Sejahtera diterbitkan sertifikat dengan Nomor Register Kementan RI-PH-13-07-0001-0818 an. Vesky Bayu, HP.

081371320442. Kegiatan Rumah Kemas ini diikuti dengan launching perdana oleh Bapak Menteri Pertanian RI pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan mengeksport buah manggis ke China sebanyak 1 kontainer.

Selanjutnya dengan adanya launching tersebut maka pangsa pasar ekspor makin terbuka dan makin meningkatnya pelaku usaha pedagang ekspor meningkatkan kualitas dan penanganan produk pada rumah kemas sesuai dengan Dokumen Sistem Mutu Keamanan Pangan.

Sedangkan Rumah Kemas yang perusahaannya berada di luar Sumatera Barat sesuai ketentuan Kementerian Pertanian dapat diaudit atau diterbitkan oleh OKKPD dimana perusahaan itu berada. Berdasarkan hal tersebut maka terbitnya sertifikat PT. Buah Angkasa dan PT. Sinar Harapan Bersatu yang sertifikatnya diterbitkan oleh OKKPD Provinsi DKI Jakarta dan OKKPP Kementerian Pertanian

Dengan diterbitkannya Sertifikat Prima, Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Registrasi Rumah Kemas oleh OKKPD Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan pangan segar asal Sumatera Barat bermutu dan aman untuk dikonsumsi masyarakat, terlebih lagi untuk memasuki pasar bebas Asean (MEA) karena sudah bersertifikat. Di samping itu, Keberadaan Rumah Kemas akan lebih menjamin mutu buah yang diekspor karena keberadaan Rumah Kemas lebih dipastikan adanya perlakuan produk sesuai SOP dan Doksistu penanganan produk pangan setelah pasca panen.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
2. Gencar melakukan sosialisasi / kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
3. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu
4. Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat provinsi sendiri maupun tingkat nasional
5. Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, sosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan

Guna mendukung pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan APBD dan APBN sebagai berikut :

Tabel 14. Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat		7.101.780.000	6.991.936.200	98,45
A P B D		1.498.880.000	1.451.377.674	96,83
I	PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN	740.160.000	703.428.574	95,04
	1 Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)	209.370.000	203.219.034	97,06
	2 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	72.690.000	68.878.000	94,76
	3 Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi	186.790.000	171.944.940	92,05
	4 Pengembangan Pangan Tradisional (Lokal) Dalam Menunjang Pariwisata	195.230.000	190.921.600	97,79
	5 Pemantauan Sosialisasi dan Analisa Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)	76.080.000	68.465.000	89,99
II	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	758.720.000	747.949.100	98,58
	1 Serifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikat	266.260.000	264.742.100	99,43
	2 Surveilen dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tingkat produsen	65.720.000	65.464.500	99,61
	3 Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikasi Prima	51.870.000	50.732.000	97,81
	4 Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (SD/MI)	66.190.000	65.949.000	99,64
	5 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar di Masyarakat	126.650.000	126.281.000	99,71
	6 Gerakan Hari Pangan Sedunia	182.030.000	174.780.500	96,02
A P B N		5.602.900.000	5.540.558.526	98,89
I	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	5.602.900.000	5.540.558.526	98,89
	1 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.837.900.000	4.796.447.000	99,14
	2 Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	420.000.000	399.771.461	95,18
	3 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	345.000.000	344.340.065	99,81

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Ketahanan pangan adalah hal yang paling strategis bagi suatu Negara, karena pangan adalah hal yang terpenting bagi kehidupan manusia. Bahkan hak pangan sendiri telah diundang undang sebagai hak asasi manusia dalam *Declaration of Human Right*. Berdasarkan UU Pangan 2012 dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



Ketahanan Pangan suatu daerah dapat digambarkan bagaimana daerah tersebut mampu memenuhi ketersediaan pangan secara fisik dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Sedangkan produksi pangan tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah, maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan

pangan dari produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan impor pangan merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat”

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	%
1		2	3	4	5	6
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Ketersediaan pangan utama (beras)	Ton	1.530.178	1.530.180	100,00

Ket. : *) Angka Ramalan I Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” adalah sebesar 100 %. Indikator kinerja capaian sasaran strategis ini adalah Ketersediaan pangan utama beras. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

Indikator Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Situasi ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi masyarakat secara agregat dapat diketahui dengan menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (*food supply*), dan penggunaan pangan (*food utilization*), hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram per kapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita perhari yang dinyatakan dalam satuan Kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energi) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait dan pihak-pihak yang sangat relevan dalam penyusunan NBM, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penyusunan NBM terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait terutama data yang telah dipublikasikan dan mempunyai legalitas dari Badan Pusat Statistik. OPD yang terlibat antara

lain BPS, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Bulog lingkup Sumatera Barat.

Dalam tabel NBM, bahan makanan menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 11 kelompok, yaitu padi-padian, makanan berpati, gula, buah / biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan dan minyak dan lemak. Penghitungan konsumsi energi dan protein menggunakan aplikasi / software NBM. Penghitungan untuk tahun 2018 menggunakan angka Ramalan I (ARAM I), tahun 2017 menggunakan Angka Tetap (ATAP) dan 2019 menggunakan angka Proyeksi. Rumus penghitungan angka konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Angka ketersediaan energi penduduk Sumatera Barat	=	ketersediaan bahan pangan perkapita perhari x kandungan kalori
Angka ketersediaan protein penduduk Sumatera Barat	=	ketersediaan bahan pangan perkapita perhari x kandungan protein

Ketersediaan pangan yaitu terjaminnya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Besarnya ketersediaan pangan di Sumatera Barat dalam bentuk **natura** dari tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Ketersediaan Pangan di Sumatera Barat Dalam Bentuk Natura Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (Angka Ramalan I 2018)

No.	Komoditi	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)*	Keterangan (+/-)
A	Pangan Nabati				
1	Padi	2.754.079			
	Beras		1.530.180	590.414	939.766
2	Jagung	1.052.408	1.883	1.615	269
3	Kedelai	1.117	41.963	41.442	521
4	Ubi kayu	201.833	37.877	31.754	6.123
5	Ubi jalar	140.908	21.389	10.764	10.625
6	Kacang tanah	4.717	2.138	1.615	523
7	Kacang hijau	264	2	0	2
8	Sayur-sayuran	665.600	431.508	279.330	152.179
	Cabe	95.489	50.667	37.044	13.623
	Bawang merah	95.534	25.883	21.356	4.527
9	Buah-buahan	569.715	231.973	159.309	72.663
B	Pangan Hewani				
10	Daging	44.490	64.590	54.359	10.231
11	Telur	80.702	54.809	48.439	6.370
12	Susu	1.353	13.325	10.764	2.561
13	Ikan	481.061	283.105	122.173	160.931

Sumber : Diolah oleh Dinas Pangan Sumbar

- Kebutuhan penduduk dihitung berdasarkan data konsumsi Susenas 2017 (BPS diolah dan di justifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP-Kementan RI)
- Kebutuhan pangan lainnya yang tidak tersedia data konsumsinya pada Susenas 2017, bersumber dari Data Pola Konsumsi Makanan Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2016-2017 (BPS Provinsi Sumatera Barat)
- Data impor dan ekspor bahan makanan tahun 2018 diasumsikan hampir sama dengan data 2015 yaitu data JTO dan data keluar masuk bahan pangan dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang (darat, udara dan laut)
- Data produksi hortikultura dan perkebunan 2018 diasumsikan sama dengan produksi 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh komoditi pangan diperkirakan berada pada kondisi surplus. Bila ditinjau dari sisi produksi, maka komoditi kedelai, kacang tanah dan kacang hijau akan mengalami kondisi minus bilamana produksi tidak ditingkatkan dan impor tidak mencukupi. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 (5.382.077 jiwa), ketersediaan pangan perkapita pertahun yang dikonsumsi penduduk Sumatera Barat pada tahun 2018 (Angka Ramalan I) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17.

Ketersediaan Pangan Untuk Dikonsumsi Penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 *)		
No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Pangan (Kg/kapita/tahun)
1	Padi-Padian	284,66
2	Makanan Berpati	11,3
3	Gula	10,38
4	Buah Biji Berminyak	29,16
5	Buah-Buahan	43,1
6	Sayur-sayuran	80,18
7	Daging	12
8	Telur	10,18
9	Susu	2,48
10	Ikan	52,6
11	Minyak dan Lemak	15,14

Sumber : Diolah oleh Dinas Pangan Sumbar
Keterangan : *) angka Ramalan I

Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2016 – 2021 maka capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Mempertahankan Ketersediaan Minimal Terhadap Energi dan Protein (2016-2018)

URAIAN	SATUAN	TARGET			REALISASI			%CAPAIAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	1.495.021	1.512.955	1.530.178	1.495.356	1.512.953	1.530.180	100,02	100,00	100,00

Untuk mendukung capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat”, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan hal-hal berikut :

a. Ketersediaan Pangan Minimal

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Untuk melihat ketersediaan energi penduduk Sumatera Barat dilakukan dengan mengkonfersikan ketersediaan bahan pangan dengan kandungan kalornya. Sedangkan ketersediaan protein dengan mengkonfersikannya dengan kandungan proteinnya. Didalam sedangkan ketersediaan protein dalam satuan gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein tahun 2018 (ARAM I) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Ketersediaan Energi dan Protein Penduduk Sumatera Barat Tahun 2018 (ARAM II)

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Protein (Gram/kapita/hari)
A	Pangan Nabati	3.652	80,86
1	Padi-padian	2.824	66,12
2	Makanan berpati	33	0,24
3	Gula	104	0,02
4	Buah biji berminyak	196	9,94
5	Buah-buahan	56	0,95
6	Sayur-sayuran	66	3,15
7	Minyak dan lemak	373	0,04
B	Pangan Hewani	237	28,67
8	Daging	84	5,9
9	Telur	35	2,76
10	Susu	4	0,22
11	Ikan	113	19,8
	Jumlah	3.889	109,13
Sumber : Data olahan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat			
Keterangan : *) angka ramalan I			

Dari tabel diatas, tahun 2018 (ARAM I) ketersediaan energi penduduk Sumatera Barat adalah sebesar 3.889 Kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 109,13 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein terbesar berasal dari pangan nabati. Ketersediaan energi yang berasal dari pangan nabati berjumlah 3.652 kkal/kapita/hari, sedangkan yang berasal dari pangan hewani 237 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi terbesar disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian sebesar 2.824 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein yang berasal dari pangan nabati sebesar 80,86 gram/kapita/hari dan yang berasal dari pangan hewani 28,67 gram/kapita/hari.



Ketersediaan energi dan protein pada tahun 2018 (ARAM I) telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh WNPX /2012 (menjadi target Nasional). AKG (Angka Kecukupan Gizi) tingkat ketersediaan untuk energi 2.400 Kkal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari.



Ketersediaan pangan baik dari segi natura maupun dari segi nilai gizinya melebihi target yang telah ditetapkan / disarankan oleh WNPG menunjukkan bahwa Sumatera Barat aman dan tidak kekurangan dari segi ketersediaan bahan pangan, meskipun ada tingkat produksinya kecil, tetapi tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Sumbar misalnya dengan mendatangkannya dari luar Sumbar.

Jika dibandingkan dengan target dari tahun 2013 – 2018 maka capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Mempertahankan Ketersediaan Minimal Terhadap Energi dan Protein

URAIAN	SATUAN	TARGET				REALISASI				%CAPAIAN			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018*)	2015	2016	2017	2018
1.1. Ketersediaan Energi *)	KKal/Kap/Hari	2.400	2.400	2.400	2.400	3.649	3.887	3.888	3.889	152,04	161,96	162,00	162,04
1.2. Ketersediaan Protein *)	Gram/Kap/Hari	63	63	63	63	92,10	109,52	109,26	109,13	146,19	173,84	173,43	173,22

*) Angka Ramalan I Tahun 2018

b. Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/ wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut.





Disamping itu, kerawanan pangan juga dapat dilihat dari sisi produksi, konsumsi dan distribusi. Aspek produksi rawan pangan adalah suatu kondisi dimana kemampuan produksi pangan masyarakat, tidak seimbang dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan pangan di daerah itu. Dalam hal ini aspek produksi hanya dilihat dari sisi kemampuan produksinya saja, bukan dari sisi ketersediaan,

karena faktor ketersediaan ini bisa dipenuhi oleh adanya pasokan antar wilayah. Aspek konsumsi berkaitan dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membeli pangan karena daya beli masyarakat sangat rendah (akibat kemiskinan). Aspek distribusi ini menyangkut ketidak seimbangan supply dalam memenuhi demand masyarakat, sehingga terjadi kelangkaan pangan pada suatu tempat, waktu, jumlah dan harga yang memadai. Bahan pangan dalam konteks ini tidak hanya berarti beras sebagai sumber pangan utama bagi konsumen, tetapi dapat meliputi berbagai sumber pangan, sebagai hasil diversifikasi pangan sesuai dengan kebiasaan/ budaya masyarakat setempat,

Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh dari jumlah masyarakat yang dibantu oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang rentan pangan, dalam hal ini diakibatkan oleh bencana alam. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan maksimal senilai Rp. 500.000,- per Kepala Keluarga. Bantuan ini awalnya ditargetkan untuk 545 Kepala Keluarga, namun saat realisasinya mencapai 1.267 KK.



Penanganan masyarakat rawan pangan dilakukan terhadap daerah rawan pangan baik itu disebabkan rawan pangan kronis maupun transien. Rawan pangan kronis adalah



ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan structural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, system pemerintahan daerah, infrastruktur public, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan dan lain-lain.

Sedangkan rawan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat seperti penyakit menular, bencana alam, gagal panen, penduduk yang mengalami gizi buruk, Rumah Tangga Miskin (RTM), ibu hamil dan ibu menyusui yang diindikasikan kurang gizi, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang, migrasi dan lain-lain. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan penghidupan pada rumah tangga, menurunnya ketahanan hidup dan kerawanan pangan kronis.

Untuk tahun 2018 penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah berupa bahan pangan yang diberikan kepada masyarakat yang diindikasikan rawan pangan akibat bencana alam sebanyak 1.267 Kepala Keluarga. Adapun alokasi penanganan rawan pangan tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	Nagari / Kecamatan	Jumlah masyarakat yang dibantu (KK)	Jumlah Bantuan	Keterangan
1	Kabupaten Agam	Matur	50	19.700.000	Balita gizi buruk
2	Kabupaten Sijunjung	Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang	50	23.550.000	Banjir bandang
3	Kota Pariaman	Kecamatan Pariaman Tengah Kecamatan Pariaman Selatan	23	10.696.000	Balita gizi buruk

No	Kabupaten / Kota	Nagari / Kecamatan	Jumlah masyarakat yang dibantu (KK)	Jumlah Bantuan	Keterangan
4	Kabupaten Solok	Nagari Kinari	199	108.452.500	Banjir bandang
		Nagari Muaro Paneh	412		
5	Kabupaten Padang Pariaman	Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	73	28.214.000	Gagal Panen (puso) akibat banjir bandang
6	Kabupaten Tanah Datar	Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara	50	14.200.000	Banjir bandang dan longsor
		Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara	30		
7	Kabupaten Pasaman	Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan	280	49.700.000	Banjir bandang
8	Kabupaten Pasaman Barat	Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman	100	17.750.000	Banjir bandang
TOTAL			1.267	272.262.500	

Untuk melihat lokasi yang telah menerima bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) di Sumatera Barat dari tahun 2014 - tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21 : Lokasi Penerima Dana Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 - 2018

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Bantuan (Rp)					Ket.
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agam	Tanjung Raya						
		Palupuh				21.550.000		
		Matur					19.700.000	
2	Pesisir Selatan	IV Nagari Bayang Utara						
		Koto XI Tarusan						
		Air Pura	12.347.300					
		IV Jurai		28.000.000				
		IV Nagari Bayang Utara		7.600.000				
3	Pasaman	Rao Utara						
		Tigo Nagari						
		Panti			13.000.000			
		Rao Selatan				21.850.000	49.700.000	
4	Kota Padang	Lubuk Kilangan				17.917.000		
5	Pasaman Barat	Sasak Ranah Pasisia						
		Talamau	30.771.000					
		Ranah Batahan				50.704.040		
		Kecamatan Pasaman					17.750.000	
6	Tanah Datar	Lintau Buo			15.000.000			
		Lintau Buo Utara					14.200.000	
7	Padang Pariaman	Lubuk Alung			10.000.000			
		2x11 Kayu Tanam					28.214.000	
8	Sijunjung	Tanjung Gadang	6.360.000					23.550.000
		Kamang Baru				46.700.000		
		Lubuk Tarok				21.949.000		
		Sumpur Kudus				6.600.000		
9	Kota Solok	Lb. Sikarah		20.000.000		21.550.000		
		Lb. Sikarah		15.600.000				
10	Limapuluh Kota	Harau				32.340.000		
11	Dharmasraya	Koto Besar dan Pulau Punjung				47.167.000		
		Sitiung dan Timpeh				6.600.000		
12	Kab. Solok	Lembang Jaya, Danau Kembar, Sungai Lasi, X Koto Singkarak dan Payung Sekaki				21.560.000		
		Nagari Kinari dan Nagari Muaro Paneh					108.452.500	
13	Kab. Solok Selatan	Sangir Batang Hari, Koto Parik Gdg diateh, Sei Pagu, Pauh duo, Sangir, Sangir jujuan, dan Sangir Balai janggo				11.440.000		
		Koto Parik Kadang diateh				76.434.480		
14	Kota Pariaman	Pariaman Tengah dan Pariaman Selatan					10.696.000	
Jumlah			49.478.300	71.200.000	38.000.000	404.361.520	272.262.500	

c. Ketersediaan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional tersebut terdiri atas cadangan cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan nasional ditujukan ditujukan untuk mengatasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak dan politik harga pangan dan / atau keadaan darurat.



Cadangan pangan (beras) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Masalah cadangan pangan bukan hal yang sederhana dan sangat sensitif sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan cadangan pangan akan berdampak tidak saja pada aspek pangan tetapi juga pada berbagai bidang yang terkait.



Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah

dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan/ atau (5) keadaan darurat.

Untuk tahun 2018 ini ditargetkan sebanyak 100 ton ekuivalen beras, dan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divre Padang penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terealisasi 100 %.

Permentan Nomor 65 Tahun 2010 menegaskan bahwa hingga tahun kelima penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan (tahun 2015), minimal jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi adalah sebesar 200 ton. Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pangan hingga tahun 2015 sudah memenuhi target yang ditetapkan bahkan melebihi. Hal ini ditambah lagi dengan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (beras) Tahun 2018 sebesar 100 ton (100.000 kg). Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (penyediaan dan penyalurannya) hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (penyediaan dan penyalurannya) hingga tahun 2018

Tahun	Jumlah Pengadaan Cadangan Pemerintah (kg)	Pengeluaran (kg)	Stock Saat Ini (kg)	Lokasi Penyaluran CPP
2010	30.000	-	30.000	
2011	54.000	15.000	69.000	Kec. Pangkalan Kab. 50 Kota (10 ton) dan Kec. Kinali Kab. Pasbar (5 ton)
2012	20.800	10.000	79.800	Kec. Simpati Kab. Pasaman (5 ton) dan Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang (5 ton)
2013	30.000	10.000	99.800	Kenagarian Koto Rajo dan Koto Nopan Kec. Rao Utara Kab. Pasaman
2014	50.000	-	149.800	
	68.000	14.000	203.800	Kec. Sasak dan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat
2015	50.000	-	253.800	
2016	22.000	43.800	232.000	Kab. Solok Selatan (25 ton), Kab. Pasaman (10 ton) dan Kab. Pasaman Barat (8,8 ton)
2017	100.000	30.000	302.000	Kab. Pesisir Selatan (10 ton), Kab. Solok (10 ton), Kab. Limapuluh Kota (10 ton)
2018	87.500	-	389.500	
	12.500	59.842	342.158	Kec. Bukik Sundi, Kab. Solok (11,304 ton), Kab. Pasaman Barat (9,15 ton), Kab. Pasaman (25,3 ton), Kota Padang (14,088 ton)
Jumlah	524.800	182.642	342.158	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah stock Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga Tahun 2018 sebanyak 342.158 kg (342,2 ton). Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi



Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016, maka cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat disalurkan untuk daerah-daerah yang terkena bencana atau darurat rawan pangan untuk mengurangi terjadinya rawan pangan. Berdasarkan hal tersebut maka cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini telah disalurkan sebanyak 182.642 kg

(182,6 ton) kepada kabupaten / kota yang terkena dampak bencana. Sehingga jumlah stok cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini (kondisi 31 Desember 2018) sebesar 342.158 kg (342,2 ton).

d. Kelembagaan Pangan



Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat telah dibentuk sejak tahun 2000 seiring dengan pembentukan Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dengan keluarnya Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Nasional, Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat telah mengalami beberapa kali perubahan/revitalisasi.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ditujukan untuk menumbuhkembangkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang diketuai langsung oleh Kepala Daerah yakni Gubernur/Bupati/Walikota. Sehingga keberadaan DKP di daerah menjadi proaktif dalam menyikapi kondisi dan persoalan pangan yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan diperkuat dengan legalitas formal oleh Kepala Dinas Pangan Sumbar Nomor 520/ 35 /Pangan/KKP/2018 tertanggal 21 April 2018. Dalam keputusan tersebut digambarkan tentang setiap rangkaian pelaksanaan kegiatan dan personel yang terlibat dalam mensukseskan acara Rapat Koordinasi dimaksud.

Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, di Provinsi Sumatera Barat telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 520-647-1018 tentang keberadaan Penetapan Dewan Ketahanan Pangan. Selain itu, juga dalam SK Gubernur Sumbar tercantum juga kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Diselenggarakannya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Propinsi Sumatera Barat, ditujukan untuk mempermudah koordinasi antara SKPD/lintas sektoral dalam berkoordinasi bagi anggota DKP untuk mencarikan solusi persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, terutama dalam persoalan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak. Hadirnya Rapat Koordinasi di Provinsi Sumatera Barat bagi DKP Kabupaten/Kota memberikan semangat baru bagi aparat di daerah untuk dapat duduk bersama membahas persoalan yang menyangkut pangan dan persoalan ikutan yang bersinggungan dengan pangan dan gizi masyarakat. Wadah pertemuan Koordinasi, diharapkan memudahkan dan mempercepat proses kerja sama secara *Team Work* diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sehingga memperpendek rantai birokrasi dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota. Selain itu juga untuk menjadi arahan bentukan kegiatan ditahun berikutnya.

Rapat Koordinasi DKP Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 di Kryad Bumi Minang Hotel Padang menghadirkan peserta dengan jumlah sebanyak 170 orang dihadiri oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumbar, Prof. Irwan Prayitno serta anggota DKP di Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Dewan Ketahanan Pangan dari Kabupaten/Kota seluruh Sumbar dengan tema, "Gerakan Keamanan Pangan Menuju Indonesia Berdaulat."

Dari hasil diskusi, dibuatlah rumusan hasil dari rapat koordinasi dewan Ketahanan Pangan diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keamanan pangan harus dilihat sebagai sistem keamanan pangan mulai dari hulu, panen, pasca panen, dan hilirisasi serta setiap aktifitas tersebut harus dikeluarkan sertifikasi terhadap keamanan pangan oleh karena itu perlu adanya gerakan keamanan pangan secara menyeluruh karena kondisi sekarang dalam keadaan darurat pangan.
2. Perlu adanya jaminan keamanan pangan bagi konsumen mulai dari anak sekolah sampai masyarakat luas.
3. Keamanan pangan harus di tangani secara terpadu melibatkan stakeholder mulai dari pemerintah, Produsen, Industri, dan Konsumen atau penguatan koordinasi lintas sektor serta penguatan sistem data dan informasi.

4. Perlu adanya tanggung jawab bersama dan membentuk tim pengawalan dari tingkat Provinsi sampai Kab/ Kota secara terpadu dibawah koordinasi Dinas Pangan yang independent diketuai langsung oleh Gubernur dan Bupati/ Wali kota
5. Perlu adanya legislasi dan peraturan tentang keamanan pangan mulai dari Provinsi sampai Kab/ Kota serta penguatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan prioritas dan strategis
6. Mengingat permasalahan yang kompleks terhadap keamanan pangan perlu dikembangkan kerangka pikir keamanan pangan yang efektif tidak reaktif tapi kreatif dan proaktif untuk semua stakeholder terkait
7. Perlu pembinaan UMKM dalam proses perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Guna mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” dilaksanakan melalui kegiatan APBD dan APBN sebagai berikut :

Tabel 23. Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		4.581.307.000	4.454.673.909	97,24
A P B D		3.912.307.000	3.833.861.659	97,99
I	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	3.912.307.000	3.833.861.659	97,99
	1 Penyusunan Database Ketahanan Pangan	55.020.000	54.686.000	99,39
	2 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	125.180.000	122.712.299	98,03
	3 Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1.135.670.000	1.133.704.000	99,83
	4 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat	48.160.000	47.589.500	98,82
	5 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	318.870.000	318.047.045	99,74
	6 Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	48.300.000	47.898.900	99,17
	7 Pengembangan Kawasan dan pembinaan Nagari Mandiri Pangan	1.762.537.000	1.700.403.981	96,47
	8 Penguatan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi	67.430.000	65.155.400	96,63
	9 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	193.870.000	190.476.696	98,25
	10 Analisis Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	55.520.000	53.928.738	97,13
	11 Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Wilayah Sumatera Barat	54.210.000	53.777.500	99,20
	12 Pengembangan Fungsional Analis Ketahanan Pangan	47.540.000	45.481.600	95,67
A P B N		669.000.000	620.812.250	92,80
I	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	669.000.000	620.812.250	92,80
	1 Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	170.000.000	149.150.500	87,74
	2 Kawasan Mandiri Pangan	274.000.000	248.859.000	90,82
	3 Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	225.000.000	222.802.750	99,02

Sasaran 3 :

Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen

Lonjakan harga pangan memang isu sensitif bagi pemerintah. Kenaikan harga pangan seolah momok yang bisa merusak citra pemerintah karena hilangnya kepercayaan publik. Adanya gejolak harga pangan memberi dampak terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Keterbatasan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator adanya gangguan-gangguan terhadap proses distribusi seperti kurang baiknya sarana transportasi, adanya dampak iklim seperti banjir, gelombang tinggi dan sebagainya.

Gangguan pada pasokan dan harga pangan perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System*) tentang kondisi pasokan dan harga pangan dari seluruh



daerah propinsi dan kabupaten/kota secara cepat (*up to date*) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak harga.

Manajemen distribusi yang baik dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat sangat mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan sepanjang waktu. Hal ini membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk menciptakan perundangan dan sebuah lembaga yang mampu memastikan terciptanya kondisi dimana seluruh masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses pangan secara mudah dengan harga yang rasional dan

terjangkau sepanjang waktu. Pemerintah wajib menjaga stabilisasi harga agar tidak terjadi gejolak atau keresahan konsumen.

Stabilisasi Harga atau *price stabilization* yaitu tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya di dalam menstabilkan harga barang dan jasa tersebut selama periode tertentu. Salah satu upaya menjaga stabilisasi harga adalah dengan adanya penyediaan pangan nasional. Penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Dengan adanya cadangan pangan nasional yang mencukupi, diharapkan lonjakan harga di waktu-waktu tertentu dapat dicegah. Tetapi saat ini pemerintah baru memiliki cadangan pangan nasional sebatas komoditas beras saja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu peran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah menjaga stabilisasi harga guna melindungi produsen dan konsumen dan menjadi sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yaitu "Stabilnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen" dengan indikator "Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)" dan "Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)". Tingkat capaian dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 24 Realisasi Tingkat Capaian Sasaran Stabilnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	1	Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)				
	a.	Beras	CV	10	3,09	100,00
	b.	Cabe Merah	CV	25	23,42	100,00
	2	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)	HPP	HPP	HPP	100,00
Rata-Rata Capaian					100,00	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis "Stabilnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen" adalah sebesar 100,00 %. Artinya

bahwa indikator “Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)”, untuk beras berada dibawah 10 yang berarti bahwa tidak terjadi gejolak harga komoditi beras di Sumatera Barat. Begitu juga dengan CV cabe merah berada di bawah 25, yang berarti harga cabe merah masih stabil. Selanjutnya, indikator “Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)” berada diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

a. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)

Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau.



Kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Pengalaman Tahun 1996 dan Tahun 1998 membuktikan bahwa terjadinya guncangan ekonomi yang kemudian berubah menjadi krisis politik, terjadi karena harga pangan melonjak drastis dalam jangka waktu yang pendek. Untuk menghindari terulangnya

kejadian tersebut, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan stabilitas harga pangan yang komprehensif dan dapat merespon beberapa perubahan lingkungan strategis seperti dinamika ekonomi global dan perubahan sistem manajemen pemerintahan agar krisis ekonomi dan krisis politik tidak terulang kembali.

➤ **Stabilisasi Harga Bahan Pangan Beras di Tingkat Konsumen**

Dalam sistem distribusi dan harga pangan, bahwa harga bahan pangan beras di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10 %, apabila CV berada diatas 10 % maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen. Angka koefisien variasi diperoleh dari gejolak harga beras dalam satu periode dibandingkan dengan harga rata-rata beras pada periode tersebut. Gambaran gejolak harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25 : Gambaran Gejolak Harga Bahan Pangan beras dan Coefisen Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2018

No	Bulan	Harga Rata-rata Beras Premium	Harga Rata-rata Beras Medium
		Tk. Konsumen	Tk. Konsumen
1	JANUARI	13.000	11.833
2	FEBRUARI	13.002	11.896
3	MARET	12.661	11.489
4	APRIL	12.774	11.532
5	MEI	12.691	11.634
6	JUNI	12.686	11.628
7	JULI	12.885	11.595
8	AGUSTUS	12.838	11.737
9	SEPTEMBER	12.888	11.776
10	OKTOBER	13.273	12.023
11	NOVEMBER	13.865	12.506
12	DESEMBER	13.884	12.511
	Rata-rata	13.037	11.847
	H-Max	13.884	12.511
	H-Min	12.661	11.489
	CV	3,27	2,91
	CV Rata-Rata	3,09	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan pokok (beras) Premium sebesar 3,27 dan beras Medium 2,91. Sesuai dengan indikator Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di Tingkat Konsumen yang ditargetkan pada tahun 2018 bahwa $CV \leq 10$, dan hal ini dapat dicapai dimana pada tahun 2018 nilai CV rata-rata harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen sebesar 3,09. Hal ini berarti capaian indikator ini adalah 323,62 dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian selama tahun 2018 harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen di Sumatera Barat dapat dikatakan stabil.

Perbandingan perolehan Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Utama Beras tahun 2016 dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26 : Coefisien Variasi Harga Beras Tahun 2017-2018

No	Uraian	Tahun	
		2017	2018
a.	CV Beras Premium di tingkat Konsumen	5,47	3,27
b.	CV Beras Medium di tingkat Konsumen	6,80	2,91
	Rata-rata	6,14	3,09

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa CV harga rata-rata beras dari tahun 2017-2018 (beras Premium dan Medium) di tingkat konsumen masih berada di bawah 10, maka masih bisa dikatakan harga beras stabil.

➤ **Stabilisasi Harga Bahan Pangan Cabe Merah di Tingkat Konsumen**

Dalam sistem distribusi dan harga pangan, bahwa harga bahan pangan cabe merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 25 %, apabila CV berada diatas 25 % maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen. Angka koefisien variasi diperoleh dari gejala harga cabe merah dalam satu periode dibandingkan dengan harga rata-rata cabe merah pada periode tersebut. Gambaran gejala harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27 : Gambaran Gejala Harga Bahan Pangan Cabe Merah dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2018

No	Bulan	Harga Rata-rata Cabe merah
		di tingkat konsumen
1	JANUARI	47.083
2	FEBRUARI	43.900
3	MARET	47.786
4	APRIL	41.194
5	MEI	32.432
6	JUNI	25.873
7	JULI	26.569
8	AGUSTUS	27.035
9	SEPTEMBER	26.459
10	OKTOBER	38.595
11	NOVEMBER	36.590
12	DESEMBER	30.910
	Rata-rata	35.369
	H-Max	47.786
	H-Min	25.873
	CV	23,42

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan utama cabe merah 23,42. Pada tahun 2018 stabilisasi harga bahan pangan pokok cabe merah di Tingkat Konsumen yakni $CV \leq 25\%$ dapat tercapai. Hal ini berarti capaian indikator ini adalah 106,75 dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian selama tahun 2018 harga pangan utama cabe merah di tingkat konsumen di Sumatera Barat dapat dikatakan stabil.



Langkah atau upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga ini selain dengan cadangan pangan pemerintah juga dengan melakukan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah untuk masyarakat melalui koordinasi dengan Bulog.

Untuk komoditi cabe merah tidak bisa dilakukan perbandingan perolehan Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Utama Cabe Merah antara tahun 2016 dengan 2018, karena indikator ini baru ada saat awal tahun 2017 yang ada dalam revisi renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan penambahan kewenangan dari perubahan nomenklatur. Perbandingan capaian kinerja Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras) di Tingkat Konsumen Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28 : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras) di Tingkat Konsumen Tahun 2017 dan 2018

Uraian	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)						
a. Beras	$CV \leq 10$	$CV \leq 10$	6,14	3,09	100 %	100 %
b. Cabe Merah	$CV \leq 25$	$CV \leq 25$	24,82	23,42	100 %	100 %

b. Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok (Gabah dan Beras) di Tingkat Produsen (HPP)

Untuk melihat Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen dapat dibandingkan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Harga beras dan gabah di tingkat produsen harus lebih tinggi dari HPP. Apabila harga beras / gabah di tingkat produsen lebih rendah dari harga HPP, hal tersebut berindikasi terjadinya gejolak harga beras / gabah. Perbandingan capaian kinerja Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di Tingkat Konsumen Tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 29 : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di Tingkat Konsumen (HPP) Tahun 2018

Uraian	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2018
Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di Tingkat Konsumen (HPP)	≥ HPP	> HPP	100%

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Tahun 2018 adalah sama dengan HPP Tahun 2017 (sesuai Inpres No 5 Tahun 2015) yaitu :

- HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani sebesar Rp.3.700,- /kg
- HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Penggilingan sebesar Rp. 3.750,-/kg
- Harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang BULOG Rp 4.600,-/kg
- Harga Beras di gudang perum BULOG sebesar Rp. 7.300,-/kg

Harga rata-rata gabah (Tingkat petani dan Tingkat Penggilingan) dan beras Premium dan Medium II di tingkat produsen Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30 : Harga rata-rata gabah (Tingkat petani dan Tingkat Penggilingan) dan beras Premium dan Medium II di tingkat produsen Tahun 2018

No	Bulan	Harga Rata-rata Beras di tingkat Produsen Tahun 2018				
		GKP Tingkat Petani	GKP Tingkat Penggilingan	GKG Tingkat Penggilingan	Beras Premium	Beras Medium
1	JANUARI	5.053	5.986	6.771	12.233	10.700
2	FEBRUARI	5.493	5.889	6.515	11.873	10.948
3	MARET	5.362	5.690	6.255	11.969	10.785
4	APRIL	5.351	5.698	6.254	11.678	10.684
5	MEI	5.236	5.541	6.173	11.573	10.494
6	JUNI	5.220	5.572	6.122	11.478	10.500
7	JULI	5.296	5.630	6.225	11.644	10.683
8	AGUSTUS	5.399	5.787	6.209	11.739	10.781
9	SEPTEMBER	5.381	5.776	6.209	11.828	10.709
10	OKTOBER	5.582	5.972	6.457	12.296	11.137
11	NOVEMBER	5.682	6.089	6.519	12.713	11.485
12	DESEMBER	5.571	6.058	6.426	12.671	11.526
Rata-rata		5.386	5.807	6.345	11.975	10.869
Ket:						
GKP = Gabah Kering Panen						
GKG = Gabah Kering Giling						

Untuk tahun 2018, harga rata-rata gabah (Tingkat petani dan Tingkat Penggilingan) dan beras Premium dan Medium II di tingkat produsen adalah Rp. 5.386,- (GKP Tingkat Petani), Rp. 5.807,- (GKP Tingkat Penggilingan), Rp. 6.345,- (GKG Tingkat Penggilingan), Rp. 11.975,- (Beras Premium), dan Rp. 10.869,- (Beras Medium). Jika dibandingkan dengan harga rata-rata beras di tingkat produsen untuk beras dan gabah KW I dan KW II, harga semua komoditi tersebut berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal itu berarti bahwa harga beras dan gabah di tingkat produsen juga stabil atau tidak mengalami gejolak harga.

➤ **Bazar / Pasar Murah**



Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang mengacu pada permasalahan utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan diatas, dengan banyaknya masalah tentang stabilitas pangan. Kegiatan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan merupakan salah satu penunjang program stabilisasi harga pangan, dalam arti yang lebih luas kegiatan ini berfungsi untuk meredam gejolak/fluktuasi harga, membantu memfasilitasi petani/produsen



sehingga masyarakat luas sebagai konsumen, dapat memperoleh harga bahan pangan dibawah harga pasar serta terjangkau oleh daya beli, sehingga harga bahan pangan stabil di masyarakat, serta inflasi dapat diminimalisir.

Data komoditi bahan pangan yang diperoleh dari petani, suplier/distributor bahan pangan yang difasilitasi, dan telah distribusikan melalui Stand TTIC di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan mobil keliling TTIC ke pelosok-pelosok wilayah Kota Padang sebagai berikut :

No	Komoditi Bahan Pangan	Jumlah
1	Cabe merah lokal	1.286 kg
2	Cabe merah jawa	1.843 kg
3	Cabe hijau	188,5 kg
4	Cabe giling halus	1.079,5 kg
5	Cabe giling goreng	313,5 kg
6	Cabe rawit	29 kg
7	Bawang merah lokal	1.738,5 kg
8	Bawang peking	587,5 kg
9	Bawang putih	1.179 kg
10	Kentang putih	4.247 kg
11	Wortel	845 kg
12	Buncis	1.207 kg
13	Tomat	1.167 kg
14	Petai	1.498 papan
15	Jengkol	9.881 buah
16	Kerupuk jengkol	57,5 kg
17	Terong	802 ikat
18	Japan	197 kg
19	Timun	1.077 kg
20	Tempe daun	713 buah

No	Komoditi Bahan Pangan	Jumlah
21	Daun sup	1.532 ikat
22	Telur	20.650 butir
23	Kerupuk sanjai	73 kg
24	Kerupuk kentang	64 kg
25	Kerupuk kamang	169 kg
26	Kerupuk taleh	126 kg
27	Bawang bombay	140 kg
28	Ubi Jalar	98 kg
29	Sayur (bayam/kangkung)	208 kg
30	Telur puyuh	86 bungkus
31	Kacang hijau	32 kg
32	Kacang panjang	60 ikat
33	Jeruk nipis	88 kg

➤ Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

TTIC merupakan sarana atau wadah Gapoktan/supplier/produsen pangan lainnya untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian khususnya beras, cabai merah keriting, dan bawang merah yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan lainnya.



Keberadaan TTIC diharapkan mampu memangkas mata rantai distribusi komoditas pangan yang dipasarkan langsung melalui TTI dan TTIC sehingga harga dapat selalu dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya.

Sejak launching pada tanggal 3 April 2018, penyaluran pangan oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC) mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Hal ini dikarenakan sudah mulai dikenalnya Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di seluruh lapisan masyarakat. Berikut tabel perkembangan penyaluran pangan dari tanggal 3 April - 10 Desember 2018 :

No	Bulan	Komoditi	Transaksi (Rp.)
1	April	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng, gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, bunga kol, tomat.	76.773.500,-
2	Mei	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng,	87.040.000,-

No	Bulan	Komoditi	Transaksi (Rp.)
		gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, gula merah, takjil, kerupuk, bawang goreng, tomat, buncis.	
3	Juni	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng, gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, gula merah, takjil, kerupuk, bawang goreng dan makanan olahan lebaran.	63.571.000,-
4	Juli	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng, gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, tempe, bawang pray, seledri, tomat.	64.847.500,-
5	Agustus	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng, gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, tempe, bawang pray, seledri, tomat	65.828.500,-
6	September	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng, gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, tempe, bawang pray, seledri, jeruk nipis, lobak singgalang, buncis, jantung pisang, ketimun, cabe rawit, selada, gula enau, kol, sawi manis, sawi putih	71.543.250,-
7	Oktober	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng, gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, tempe, bawang pray, seledri, jeruk nipis, lobak singgalang, buncis, ketimun, cabe rawit, selada, kol, sawi manis, sawi putih.	109.697.000,-
8	November	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng, gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, tempe, bawang pray, seledri, jeruk nipis, lobak singgalang, buncis, ketimun, cabe rawit, selada, kol, sawi manis, sawi putih.	70.034.500,-
9	Desember	Beras, cabe merah, bawang merah, jengkol, petai, daging ayam, telur ayam, kacang tanah, minyak goreng, gula pasir, kentang, bawang putih, cabe hijau, wortel, terung, tempe, bawang pray, seledri, jeruk nipis, lobak	59.456.250,- (sampai tanggal 10 Desember 2018)

No	Bulan	Komoditi	Transaksi (Rp.)
		singgalang, buncis, ketimun, cabe rawit, selada, kol, sawi manis, sawi putih.	

➤ **Kerjasama Distribusi Pangan dari Provinsi Sumatera Barat**

Komoditi pertanian pangan Sumatera Barat yang potensial dan menguntungkan untuk dipasarkan antara lain, padi dan hortikultura, sebagai komoditi unggulan. Kedua komoditi ini telah dikembangkan distribusi/pemasarannya menembus pasar luar Sumatera Barat, antara lain Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan sebagainya.



Konsumen Beras Sumatera Barat di Riau dan Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Sumatera Barat dan memenuhi kebutuhan pangan daerah lain di sekitar Sumatera Barat, seperti Provinsi Riau dan sekitarnya, perlu dilaksanakan upaya perluasan distribusi dan pemasaran hasil pangan, sebagai komoditi unggulan.

Selain didistribusikan ke Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui gapoktan juga melaksanakan pendistribusian ke Jakarta.

Dalam tahun 2018 telah dilaksanakan pendistribusian/pengiriman beras ke Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kota Batam sebanyak 200,2 ton dan ke Jakarta sebanyak 6 ton, sehingga total yang telah didistribusikan sebesar 206,2 ton (206.200 kg), dengan harga rata-rata per kilogramnya Rp. 14.500,-/kg. Penerima distribusi beras ini terdiri dari Rumah Makan, Koperasi, TTIC dan Ormas Minang.



Realisasi pendistribusian beras ke luar Sumatera Barat dalam tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 31 berikut.

Tabel 31. REALISASI DISTRIBUSI BERAS DARI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

No.	PRODUSEN/GAPOKTAN	JUMLAH			KONSUMEN/PEDAGANG/PEMBELI
		Kg	Harga/Kg (Rp.)	Rp	
		202200			
1	PERPAPIL	18,000	14,500	261,000,000	Rumah Makan DENDENG BATOKOK
		20,000	15,500	310,000,000	KOPERASI KARYA TANI BATAM MADANI
		15,000	12,500	187,500,000	Rumah Makan NURDIN
2	BATANG TIMBULUN	6,000	12,500	75,000,000	TTIC RIAU
		10,000	13,500	135,000,000	KOPERASI KARYA TANI BATAM MADANI
		65,000	13,500	877,500,000	KEDAI HARMAN
		65,700	14,000	919,800,000	UD. PADI SARUMPUN
				-	
3	HARAPAN BERSAMA	2,500	13,000	32,500,000	TTIC RIAU
				-	
4	PERPAPIL	1,000	16,000	16,000,000	ORMAS MINANG DI JAKARTA
	KOBAYA MAJU BERSAMA	500	16,000	8,000,000	ORMAS MINANG DI JAKARTA
	BATANG TIMBULUN	2,000	16,000	32,000,000	ORMAS MINANG DI JAKARTA
	TOTAL	205,700		2,854,300,000	

Untuk komoditi hortikultura yang telah didistribusikan terdiri dari daun bawang, bunga kol dan salada. Dalam tahun 2018 telah dilaksanakan pendistribusian komoditi hortikultura tersebut sebanyak 188.000 kg (188 ton) dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.586.000.000,- oleh Gapoktan BARECO JAYA, Kabupaten Agam.

Komoditi hortikultura (sayuran) yang telah didistribusikan ke Provinsi Riau dan Kepulauan Riau selama tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 32. REALISASI DISTRIBUSI HORTIKULTURA DARI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

No.	KOMODITI	JUMLAH			PRODUSEN/GAPOKTAN
		Kg	Harga/Kg (Rp.)	Rp	
1	Daun Bawang	140,000	8,500	1,190,000,000	BARECO JAYA
2	Bunga Kol	12,000	10,500	126,000,000	
3	Selada	36,000	7,500	270,000,000	
	TOTAL	188,000		1,586,000,000	



Komoditi hortikultura yang akan didistribusikan ke Riau dan Batam

Untuk mendukung capaian sasaran stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ;

a. Distribusi Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang, setiap waktu merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat, disuatu wilayah menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.

Sesuai dengan perkembangan dan karakteristik komoditas pangan yang beragam, maka proses distribusi pangan yang terjadi antar wilayah, antara propinsi dan antar pulau adalah bersifat dinamis. Apabila sistem distribusi komoditas pangan berfungsi dengan baik, maka dalam kondisi normal proses distribusi komoditas bahan pangan mampu menggerakkan suatu komoditas pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen setiap saat, dalam jumlah dan kualitas yang cukup dan harga terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Ciri utama dari produksi komoditas bahan pangan adalah bersifat musiman, mudah rusak dan umumnya lokasi produsen pangan hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi. Dalam periode waktu tertentu seperti pada saat panen raya dimana produksi komoditas pangan berlimpah, harga komoditas pangan akan cenderung jatuh atau murah. Sebaliknya pada periode tertentu produksi pangan berkurang maka harga komoditas pangan akan cenderung meningkat.

Pada saat kondisi defisit, dimana daerah-daerah sumber produksi pangan sudah mulai berkurang dan produksi yang dihasilkan tidak lagi mencukupi kebutuhan konsumen, maka situasi pasar perlu dirangsang sehingga tercapai perdagangan antar daerah yang mencukupi. Dengan demikian tingkat harga di daerah tersebut tidak melebihi suatu tingkat tertentu yang dapat ditoleransi.

Demikian pula sebaliknya, pada saat kondisi di daerah-daerah sentra dimana produksi pangan mengalami surplus, maka perbedaan harga antar daerah harus dapat dijaga sedemikian rupa sehingga distribusinya dapat menyebar dan mengisi kantong-kantong di daerah-daerah yang mengalami kekurangan pangan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi dalam penyaluran kelebihan produksi pangan tersebut sehingga tingkat harga yang memadai dapat terjaga, baik disisi produsen maupun disisi konsumen.

Distribusi pangan pada dasarnya bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan dan karakteristik komoditas pangan yang beragam. Apabila sistem distribusi tidak berfungsi dengan baik karena sesuatu hal atau adanya masalah infrastruktur distribusi (ketersediaan transportasi darat, laut, udara, jalan, pelabuhan, gudang penyimpanan, cadangan pangan dll) yang kurang memadai dan kondisi iklim yang kurang mendukung untuk pendistribusian pangan maka stabilitas pasokan pangan akan terganggu yang akhirnya berdampak pada pasokan pangan yang kurang serta harga yang diterima oleh konsumen akan meningkat.

Distribusi pangan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk menyalurkan produk komoditas pangan dari produsen agar dapat sampai ke konsumen secara tepat waktu dan jumlah yang cukup serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Proses penyampaian

produk komoditas pangan dari tingkat produsen seringkali harus melalui rantai pelaku-pelaku distribusi pangan untuk dapat sampai kepada konsumen pemakai akhir. Aspek distribusi dalam hal ini sangat berperan dalam rangka stabilisasi harga pangan. Gangguan yang terjadi pada subsistem distribusi pangan akan berpengaruh besar terhadap situasi ketahanan pangan, baik di wilayah konsumen maupun pada wilayah produsen.

Permasalahan yang sering terjadi dalam aspek distribusi pangan antara lain disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau daerah yang relatif jauh, keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar, serta banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi. Akibat dari permasalahan ini adalah terjadinya gangguan pasokan yang diindikasikan oleh terjadinya fluktuasi harga.

b. Akses Pangan

Fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan ini dapat kita analisa dari diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut dinyatakan juga bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, dan pemerintah (pusat dan daerah) bertanggungjawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumahtangga dan perorangan.

Berdasarkan hal tersebut memperkuat akses pangan masyarakat merupakan hal yang penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara konsep, akses pangan dipengaruhi oleh aspek fisik, ekonomi dan sosial. Aspek fisik dicirikan oleh ketersediaan pangan disuatu wilayah baik sebagai hasil produksi setempat maupun pasokan dari daerah lain yang kondisinya sangat tergantung pada jalur distribusi dan prasarana infrastruktur dasar seperti jalan dan pasar. Aspek ekonomi terkait dengan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan dan aspek sosial meliputi pendidikan dan modal sosial masyarakat.

Permasalahan akses pangan dapat bersifat sesaat maupun kronis. Permasalahan yang bersifat sesaat biasanya disebabkan oleh adanya gangguan terhadap potensi sumber daya seperti konflik sosial dan bencana alam. Sedangkan yang bersifat kronis yang

umumnya terjadi di daerah rawan pangan dapat disebabkan karena adanya ketimpangan pada salah satu aspek tersebut diatas atau atau bahkan ketiga-tiganya, sehingga penanganan yang harus diambil akan berbeda sesuai dengan penyebab timbulnya masalah aksesibilitas pangan tersebut dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan sumberdaya setempat.

Faktor ketersediaan sebagai salah satu faktor yang menentukan tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dapat dilihat dari besaran stok atau cadangan pangan, di samping besaran produksi dan jumlah pangan yang masuk dan keluar wilayah. Penggilingan memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pangan di suatu wilayah, antara lain: (1) Sebagai penyedia kebutuhan masyarakat; (2) Menjadi titik sentral dari suatu kawasan industri produksi padi, karena berfungsi sebagai titik pertemuan antara perubahan bentuk padi menjadi hasil utama berupa beras; (3) Menentukan jumlah ketersediaan beras, mutu dan kualitas beras; (4) Menentukan tingkat harga jual dan pendapatan yang diperoleh petani serta tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen; dan (5) Mampu membuka lapangan pekerjaan di daerah pedesaan.

Besaran stok sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Gejolak harga pangan di tengah masyarakat dapat ditekan apabila stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Selain itu, pergerakan gabah dan beras mempengaruhi tingkat stok gabah dan beras di suatu usaha penggilingan. Kekurangan stok akan dipenuhi oleh pasokan dari luar wilayah penggilingan bersangkutan. Oleh karena itu, informasi mengenai besarnya stok pangan (gabah dan beras) di penggilingan secara regular serta alur pergerakan gabah dan beras di suatu penggilingan sangat diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan ketersediaan pangan, terutama pada waktu-waktu tertentu dimana terjadi gejolak harga pangan.

c. Informasi harga dan Pasokan Pangan

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Penyediaan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.

Untuk mendapatkan pelayanan informasi harga dan pasokan pangan secara cepat dan akurat, diperlukan ketersediaan data/informasi harga dan pasokan pangan (jumlah dan jenis komoditi yang diberikan, serta frekuensi ketersediaan data dan informasi),

selanjutnya perlu disiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mengumpulkan data/informasi serta menganalisis harga, dan pasokan pangan.

Guna mendukung pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan APBD dan APBN sebagai berikut :

Tabel. 33 Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Stabilitasnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen		1.245.586.000	1.190.200.308	95,55
A P B D		576.586.000	569.388.058	98,75
VII.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	576.586.000	569.388.058	98,75
	1 Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	47.990.000	47.807.720	99,62
	2 Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	64.360.000	64.161.500	99,69
	3 Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah	48.570.000	47.688.250	98,18
	4 Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan	168.276.000	164.586.900	97,81
	5 Pengembangan Panel Harga Pangan Pokok	47.740.000	46.282.000	96,95
	6 Bazar / Pasar Murah Bahan Pangan	199.650.000	198.861.688	99,61
A P B N		669.000.000	620.812.250	92,80
I	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	669.000.000	620.812.250	92,80
	1 Lumbung Pangan Masyarakat	170.000.000	149.150.500	87,74
	2 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	274.000.000	248.859.000	90,82
	3 Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan	225.000.000	222.802.750	99,02

D. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Guna pencapaian sasaran-sasaran strategis yang menjadi perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pangan dengan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2018, dialokasikan anggaran pendukungnya kedalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program ketahanan pangan, baik melalui dana APBD maupun APBN.

a. Dukungan APBD

Realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat terlaksana dari pagu dana sebesar Rp. 18.041.243.473,- berhasil terserap sebesar Rp. 17.649.029.890,- atau sebesar 97,83% dengan sisa dana Rp. 392.213.583,-. Secara rinci realisasi fisik dan realisasi keuangan perkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34 : **Dukungan Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	% REALISASI	KET.
SKPD DINAS PANGAN		18.041.243.473	17.649.029.890	392.213.583	97,83	
BELANJA TIDAK LANGSUNG		8.613.707.648	8.464.203.891	149.503.757	98,26	
I	Gaji dan Tunjangan	6.105.237.448	5.967.036.215	138.201.233	97,74	
II.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.508.470.200	2.497.167.676	11.302.524	99,55	
BELANJA LANGSUNG		9.427.535.825	9.184.825.999	242.709.826	97,43	
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.691.947.025	1.603.676.073	88.270.952	94,78	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.327.550	35.242.500	85.050	99,76	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.500.000	298.913.816	49.586.184	85,77	
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	537.361.975	503.778.447	33.583.528	93,75	
	4 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	77.500.000	76.681.670	818.330	98,94	
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.396.900	35.355.150	41.750	99,88	
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.645.600	30.952.200	693.400	97,81	
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.302.800	21.281.125	21.675	99,90	
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	-	100,00	
	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	544.813.200	541.381.165	3.432.035	99,37	
	10 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	10.000.000	10.000.000	-	100,00	
	11 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	15.100.000	15.100.000	-	100,00	
	12 Penyediaan Makanan dan Minuman	19.999.000	19.990.000	9.000	99,95	
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.346.350.000	1.331.406.010	14.943.990	98,89	
	13 Pengadaan Meubeleur	99.300.000	96.013.600	3.286.400	96,69	
	14 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	137.650.000	135.174.200	2.475.800	98,20	
	15 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	29.040.000	28.883.500	156.500	99,46	
	16 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	104.025.000	99.050.510	4.974.490	95,22	
	17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.950.000	39.706.000	244.000	99,39	
	18 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	35.800.000	35.800.000	-	100,00	
	19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	17.000.000	16.575.050	424.950	97,50	
	20 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	735.000.000	733.266.000	1.734.000	99,76	
	21 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.585.000	146.937.150	1.647.850	98,89	
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	72.316.800	70.842.750	1.474.050	97,96	
	22 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	72.316.800	70.842.750	1.474.050	97,96	
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	12.904.000	11.616.000	1.288.000	90,02	
	23 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.904.000	11.616.000	1.288.000	90,02	

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	% REALISASI	KET.
V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	316.245.000	312.657.775	3.587.225	98,87	
24 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	68.730.000	66.643.175	2.086.825	96,96	
25 Penatausahaan Keuangan SKPD	204.070.000	202.793.600	1.276.400	99,37	
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	23.929.000	71.000	99,70	
27 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Tahunan	19.445.000	19.292.000	153.000	99,21	
VI PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN	740.160.000	703.428.574	36.731.426	95,04	
28 Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)	209.370.000	203.219.034	6.150.966	97,06	
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka 29 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	72.690.000	68.878.000	3.812.000	94,76	
30 Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi	186.790.000	171.944.940	14.845.060	92,05	
31 Pengembangan Pangan Tradisional (Lokal) Dalam Menunjang Pariwisata	195.230.000	190.921.600	4.308.400	97,79	
32 Pemantauan Sosialisasi dan Analisa Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)	76.080.000	68.465.000	7.615.000	89,99	
VII. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	5.247.613.000	5.151.198.817	96.414.183	98,16	-
33 Penyusunan Database Ketahanan Pangan	55.020.000	54.686.000	334.000	99,39	
34 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	125.180.000	122.712.299	2.467.701	98,03	
35 Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1.135.670.000	1.133.704.000	1.966.000	99,83	
36 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat	48.160.000	47.589.500	570.500	98,82	
37 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	318.870.000	318.047.045	822.955	99,74	
38 Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	48.300.000	47.898.900	401.100	99,17	
39 Pengembangan Kawasan dan pembinaan Nagari Mandiri Pangan	1.762.537.000	1.700.403.981	62.133.019	96,47	
40 Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	67.430.000	65.155.400	2.274.600	96,63	
41 Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	47.990.000	47.807.720	182.280	99,62	
42 Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	64.360.000	64.161.500	198.500	99,69	
43 Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah	48.570.000	47.688.250	881.750	98,18	
44 Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan	168.276.000	164.586.900	3.689.100	97,81	
45 Pengembangan Panel Harga Pangan Pokok	47.740.000	46.282.000	1.458.000	96,95	
46 Bazar / Pasar Murah Bahan Pangan	199.650.000	198.861.688	788.312	99,61	
47 Serifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikat Prima)	266.260.000	264.742.100	1.517.900	99,43	
48 Surveilen dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tingkat produsen	65.720.000	65.464.500	255.500	99,61	
49 Pemasarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikasi Prima	51.870.000	50.732.000	1.138.000	97,81	

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	% REALISASI	KET.
50 Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (SD/MI)	66.190.000	65.949.000	241.000	99,64	
51 Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar di Masyarakat	126.650.000	126.281.000	369.000	99,71	
52 Gerakan Hari Pangan Sedunia	182.030.000	174.780.500	7.249.500	96,02	
53 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	193.870.000	190.476.696	3.393.304	98,25	
54 Analisis Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	55.520.000	53.928.738	1.591.262	97,13	
55 Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Wilayah Sumatera Barat	54.210.000	53.777.500	432.500	99,20	
56 Pengembangan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan	47.540.000	45.481.600	2.058.400	95,67	

b. Dukungan APBN

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang didanai oleh APBN dari dana dekonsentrasi dengan pagu dana sebesar Rp. 9.516.100.000,- berhasil terserap oleh Dinas Pangan Sumatera Barat sebesar Rp. 9.213.918.890,- atau sebesar 96,82% dengan sisa dana Rp. 302.181.110,-. Sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100 %. Secara rinci realisasi fisik dan realisasi keuangan perkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35 : *Dukungan Anggaran APBN, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat*

NO. URUT	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI RUPIAH MURNI		SISA DANA	
			KEUANGAN			
			Rp.	(%)		FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
089266	DANA DEKONSENTRASI	9.516.100.000	9.213.918.890	96,82	100,00	302.181.110
14	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	9.516.100.000	9.213.918.890	96,82	100,00	302.181.110
1814	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	2.553.000.000	2.421.517.000	94,85	100,00	131.483.000
102	Lumbung Pangan Masyarakat	246.000.000	226.399.500	92,03	100,00	19.600.500
108	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	1.708.000.000	1.597.319.900	93,52	100,00	110.680.100
111	Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan	599.000.000	597.797.600	99,80	100,00	1.202.400
1815	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	669.000.000	620.812.250	79,14	100,00	48.187.750
105	Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	170.000.000	149.150.500	87,74	100,00	20.849.500
106	Kawasan Mandiri Pangan	274.000.000	248.859.000	90,82	100,00	25.141.000
107	Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan	225.000.000	222.802.750	99,02	100,00	2.197.250
1816	Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	5.602.900.000	5.540.558.526	94,63	100,00	62.341.474
101	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.837.900.000	4.796.447.000	99,14	100,00	41.453.000
106	Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	420.000.000	399.771.461	95,18	100,00	20.228.539
107	Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	345.000.000	344.340.065	99,81	100,00	659.935
1817	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	691.200.000	631.031.114	91,30	100,00	60.168.886
101	Layanan dukungan manajemen eselon I	691.200.000	631.031.114	91,30	100,00	60.168.886

Tabel 36 : Rekapitulasi anggaran dan realisasi keuangan per program pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik
1	Program Diversifikasi Pangan	740.160.000	703.428.574	95,04	100,00
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5.247.613.000	5.151.198.817	98,16	100,00
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.516.100.000	9.213.918.890	96,82	100,00
	Jumlah	15.503.873.000	15.068.546.281	97,19	100,00

Bila dilihat dari pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang keseluruhannya mencapai 100% bahkan lebih, sedangkan realisasi keuangannya dibawah 100 % (rata-rata 97,19 %), artinya dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini terdapat efisien biaya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh dana baik APBD maupun APBN. Dari dana APBD terdapat 2 program, yaitu Program Ketahanan Pangan dan Program Diversifikasi Pangan. Sedangkan dukungan APBN melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Alokasi anggaran Ketahanan Pangan Sumatera Barat Tahun 2014 s/d 2018 baik melalui APBD maupun APBN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Alokasi Anggaran Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 - 2018

No.	Pendanaan	Anggaran (Rp,-)				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	APBN	10.754.138.000	12.992.679.000	12.848.330.000	6.030.500.000	9.516.100.000
1	Dekonsentrasi (DK)	8.662.638.000	11.101.372.000	12.848.330.000	6.030.500.000	9.516.100.000
2	Tugas Pembanguan (TP)	2.091.500.000	1.891.307.000	-	-	-
B	APBD	17.001.138.238	17.830.971.266	18.116.523.684	17.425.724.260	18.041.243.473
1	Belanja Tidak Langsung	7.450.341.238	8.010.385.386	8.117.614.434	8.138.712.297	8.613.707.648
2	Belanja Langsung	9.550.797.000	9.820.585.880	9.998.909.250	9.287.011.963	9.427.535.825
	Jumlah	27.755.276.238	30.823.650.266	30.964.853.684	23.456.224.260	27.557.343.473

BAB IV

PENUTUP

BAB IV, berisi :

a. Kesimpulan

b. Rekomendasi

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan

(2018), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pangan pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena kesemua indikator memenuhi kriteria sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat sebagai kepala daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas Pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah sangat baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak pada aspek ketersediaan bahan pangan dimana saat ini kondisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Sumbar sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Kedua, belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/ beras, sehingga bisa saja terjadi fluktuasi harga yang ekstrim terhadap bahan pangan tertentu dalam kondisi tertentu. Disamping itu belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan

Ketiga, masih tingginya ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu terutama beras. Karena bagi masyarakat Sumatera Barat "belum kenyang kalau belum makan nasi". Belum optimalnya pengolahan pangan lokal dan rendahnya kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan sehat serta masih belum optimalnya pengawasan keamanan pangan terpadu juga menjadi tantangan Dinas Pangan Sumbar kedepannya.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Rekomendasi

1. Pendekatan ketersediaan pangan tercermin dari berbagai kebijakan yang mengoptimalkan produksi pangan. Berbagai kebijakan di bidang pertanian sebagian besar diarahkan untuk peningkatan produksi padi. Oleh sebab itu sejauh mungkin perlu diusahakan swasembada pangan (beras). Jika swasembada di tingkat nasional sudah tercapai, maka langkah selanjutnya menjamin ketersediaan pangan di tingkat regional melalui BULOG. Rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :
 - Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
 - Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi)

- Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan
 - meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
 - Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal
2. Agar individu atau rumah tangga dapat memiliki akses terhadap pangan, maka pemerintah harus berperan aktif mengendalikan harga di tingkat konsumen. Rekomendasi strategi yang dapat dilaksanakan antara lain :
- Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi pangan yang efektif dan efisien
 - Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan
 - Mendorong peran serta kelembagaan pangan dan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan meningkatkan akses pangan
 - Memantau stabilitas pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat
 - Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui SIDI (Sistem Informasi Dini) dan penyusunan peta rawan pangan melalui Sistem Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG).
3. Dalam rangka meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :
- Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
 - Gencar melakukan sosialisasi / kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
 - Mendorong peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu
 - Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat provinsi sendiri maupun tingkat nasional
 - Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, sosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan
4. Menambah jenis cadangan pangan nasional, tidak hanya beras, tetapi juga komoditi lainnya seperti bawang, cabe, dan lainnya.

PENGHARGAAN-PENGHARGAAN

**PENGHARGAAN BIDANG KETAHANAN PANGAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2013 - 2018**

1. Tahun 2013

- Komitmen Pengembangan Sentra Kakao dalam Pemberdayaan petani dari Swiss Contact dan ADM Cocoa Singapura.
- Sebagai Provinsi Terbaik Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Komitmen Program Sub Sektor Perkebunan dengan Bantuan Innova Tahun 2013
- Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara”

2. Tahun 2014

- Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara”, kategori
 - ✓ Pembina Ketahanan Pangan tingkat Gubernur (**Prof. DR. Irwan Prayitno, P.Si, MSC**, Gubernur Sumatera Barat)
 - ✓ Pembina Ketahanan Pangan Tingkat Kepala Desa (**Yoharman, S.Ag**, Kepala Desa Aia Manggih Kab. Pasaman)
 - ✓ Pelaku Ketahanan Pangan / Pemberdayaan (**KWT Melinjo Indah**, Kabupaten Pesisir Selatan)
 - ✓ Pelayanan / Penyuluh Ketahanan Pangan (**Irma Mustika Huryati, Sp**, Kabupaten Pasaman)

3. Tahun 2015

- Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara”, kategori
 - ✓ Industri Pengolahan Pangan (**Kelompok Tani Kembang Sari Prima** dari Kab. Agam)
 - ✓ Pemberdayaan masyarakat (**KWT Bunga Melati** dari Kota Payakumbuh)
 - ✓ Pelayan/pendamping Ketahanan Pangan (**Ade Candra SPt** dari Kab. Pasaman)
 - ✓ Pembina Ketahanan Pangan tingkat Nagari/Walinagari. (**Reflismen** dari Kab. Agam)

4. Tahun 2016

- Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara” , kategori :

No	Nama	Alamat	Kategori
1.	Joni Saputra	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Pelopor Ketahanan Pangan
2.	Gapoktan Albasiko II, Ketua: Karno Fahrudin	Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Pelaku Pemberdayaan Masyarakat
3.	Kelompok Unit Pelayanan, Pengembangan, Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) Pelangi Ketua: Zuharnita	Kel. Bukit Apit Puhun, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	Pelaku Pengembangan Industri Pangan Olahan/Perakitan Teknologi Pangan
4.	Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc	Provinsi Sumatera Barat	Pembina (Gubernur)
5.	Pujiyono	Walinagari Sungai Pulai, Kec. Silaut, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Pembina (Kepala Desa/Lurah)

5. Tahun 2017

- Satya Lencana Pembangunan Bidang Pangan Tingkat Nasional pada Penas Tani XV di Aceh

6. Tahun 2018

- Kegiatan penghargaan tidak ada pelaksanaannya oleh BKP Pusat, sehingga di tahun ini, Tingkat Provinsi juga tidak melaksanakannya.



Kepala Dinas Pangan Sumbar Menerima Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2013 oleh Wakil Presiden RI



Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2014 oleh Presiden RI



Penyerahan Penghargaan pada Bulan Mutu Pertanian Tahun 2014



Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2015 oleh Presiden RI, yang diwakili oleh KWT Kembang Sari Prima Kab. Agam



Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2016 yang diserahkan oleh Presiden RI



Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Tahun 2017 yang diserahkan oleh Presiden RI